



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



2022

TAHUN ANGGARAN

Perubahan **PRIORITAS DAN PLAFON** **ANGGARAN SEMENTARA** PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	8
2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	8
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	9
3.1. Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	10
3.2. Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	17
3.3. Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah... ..	35
BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	88
4.1 Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	88
4.2 Rincian Perubahan Plafon sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Tidak Terduga, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	246
BAB V PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	247
5.1. Perubahan Rincian Plafon Anggaran Penerimaan Pembiayaan	247
BAB VI PENUTUP	248

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	8
Tabel 3.1	Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	10
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	17
Tabel 3.3	Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.....	35
Tabel 4.1	Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	88
Tabel 4.2	Rincian Perubahan Plafon Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Tidak Terduga, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	246
Tabel 5.1	Perubahan Rincian Plafon Anggaran Penerimaan Pembiayaan	247



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS Perubahan APBD

APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022. APBD tahun 2022 tersebut memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian dengan adanya regulasi dan kebijakan terbaru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, berupa:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau;
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.

Disisi Pendapatan Daerah, terjadi perubahan asumsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian, mencakup:

1. Perubahan proyeksi target Pendapatan Asli Daerah.
2. Perubahan proyeksi target Pendapatan Dana Transfer.
3. Perubahan proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Belanja Tahun Anggaran 2022 berdasarkan pada Peraturan



Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2022 dilakukan dalam rangka penyesuaian atas:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
2. Perubahan proyeksi pendapatan daerah dengan memperhitungkan hasil evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2021;
3. Adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
4. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2022.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) dilakukan guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan umum APBD yang berimbas pada perubahan struktur APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dengan memperhatikan perubahan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat;
2. Menyesuaikan penganggaran belanja daerah, dengan memperhatikan perubahan kebijakan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dan penyesuaian penerimaan SiLPA berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI;



3. Memberikan landasan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
4. Memberikan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan Perubahan RKA OPD Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009



- Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa



- kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
32. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 560);
34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 564);
35. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pengelola Keuangan, Pengelola Barang dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 565);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026;
37. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, maka rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	3.480.323.080.509	3.477.824.743.937	(2.498.336.572)
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.348.493.617.641	1.369.676.011.525	96.066.552.310
4.1.01	Pajak Daerah	1.150.224.138.161	1.240.015.654.946	134.791.516.785
4.1.02	Retribusi Daerah	69.994.479.480	10.236.421.000	(59.533.058.480)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.150.000.000	2.490.319.871	(6.659.680.129)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	119.125.000.000	116.933.615.708	27.467.774.134
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.130.568.412.868	2.100.568.412.868	38.864.983.786
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.130.568.412.868	2.100.568.412.868	38.864.983.786
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.261.050.000	7.580.319.544	6.319.269.544
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.261.050.000	1.265.040.000	3.990.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	6.315.279.544	6.315.279.544
	JUMLAH PENDAPATAN	3.870.323.080.509	3.828.339.214.108	(41.983.866.401)



BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tetap diarahkan pada pelaksanaan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 yaitu: **“Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional”**. Tema ini mengalami perubahan untuk mengakomodir isu pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 sesuai dengan RKP Tahun 2022. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu:

1. Pembangunan Manusia Yang Berkualitas, Unggul dan Merata;
2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Yang Merata;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal.

Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional pada Perubahan APBD tahun 2022 tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 3.1

Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	Dinas Sosial	
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	Dinas Sosial	
			Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
			Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	
			Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	
			Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	
			Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
			Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
			Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Inflasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Dinas Pendidikan	
			Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Dinas Pendidikan	
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan	
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	Dinas Pendidikan	
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Dinas Pendidikan	
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	Dinas Pendidikan	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kesehatan	
			Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi	Sekretariat Daerah	



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Kepulauan Riau yang difasilitasi		
				Badan Penghubung Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Inspektorat Daerah	
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kebudayaan	
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan				



No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan pelayanan drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Rasio Elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
69	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Pendidikan	110.305.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Dinas Pendidikan	70.320.609.056
			Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan	70.320.609.056
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	70.320.609.056



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Dinas Pendidikan	70.320.609.056
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Dinas Pendidikan	70.320.609.056
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	70.320.609.056
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan	70.320.609.056
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	70.320.609.056
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	794.160.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kesehatan	4.877.127.446
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kesehatan	22.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Dinas Kesehatan	22.551.094.270



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Persentase Puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD	Dinas Kesehatan	22.551.094.270



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Raja Ahmad Tabib		
			Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
			Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	22.551.094.270
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	76.500.000
			Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	76.500.000
			Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Dinas Kesehatan	76.500.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Dinas Kesehatan	1.006.462.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	56.852.420
			Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	12.371.487.019



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial	2.616.417.706
			Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial	2.616.417.706
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	2.153.184.447
			Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	2.153.184.447
			Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	2.153.184.447
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	2.153.184.447
			Persentase sarana - prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	Dinas Sosial	2.153.184.447
			Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	2.153.184.447
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola	Dinas Sosial	282.861.200



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	75.155.000
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	248.040.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.030.835.616
			Cakupan pembinaan atlet muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.030.835.616
			Cakupan pembinaan olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.030.835.616
			Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional yang memperoleh medali emas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.030.835.616
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kebudayaan	7.139.532.874
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kebudayaan	7.283.217.522
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	554.810.718
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM sejarahwan yang	Dinas Kebudayaan	957.689.316



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Berkompetensi		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	238.325.228
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	Dinas Kebudayaan	311.834.016
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.998.200
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang tepat waktu dan akurat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.020.679.950
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	176.799.300
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.218.000
			---	Badan Penghubung	1.133.123.556



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Daerah	
			Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.550.955.819
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	537.919.800
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	193.159.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	134.221.300
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	308.487.500
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.755.632.880
70	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	Dinas Sosial	3.395.036.009
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	Dinas Sosial	3.395.036.009



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	3.395.036.009
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	466.217.903
			Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	466.217.903
			Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	466.217.903
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	20.103.147.330
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	585.000.000
			Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	585.000.000
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	585.000.000



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	48.800.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	200.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	104.849.704
			Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	104.849.704
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	377.245.597
			Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	377.245.597
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	135.077.260
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.048.365.570
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	641.176.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Pariwisata	12.713.119.747
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	1.812.990.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	1.812.990.000
			Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Dinas Pariwisata	1.812.990.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	9.795.155.692
			Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata	9.795.155.692
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Dinas Pariwisata	330.913.200
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Dinas Pariwisata	493.199.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	753.737.336
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	5.109.736.500
			Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	5.109.736.500
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.446.550.000



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.446.550.000
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.446.550.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	249.330.000
			Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	249.330.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	316.500.000
			Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	316.500.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	726.070.850
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Inflasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.108.943.097
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45.846.140



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	496.117.350
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	---	Sekretariat Daerah	986.796.540
71	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kesehatan	1.839.316.919
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Dinas Kesehatan	2.062.499.400



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Persentase Puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
			Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	2.062.499.400
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Cakupan pelayanan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	144.806.125



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
		LIMBAH		Pertanahan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Panjang Jalan Berkondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	60.747.742.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118
			Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118
			Pengembangan Sistem Pemulihan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118
			Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118
			Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118
			Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118
			Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.716.333.854
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Dokumen Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	488.502.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kualitas Air Laut	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000
			Indeks Kualitas Udara Ambien	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	150.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Target Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000.000
			Target Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Perhubungan	6.269.630.931
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	Dinas Perhubungan	1.627.000.406
			Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat (AKDP dan Angkutan Perkotaan)	Dinas Perhubungan	1.627.000.406
			Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	1.627.000.406
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Dinas Perhubungan	70.433.981.993
			Persentase ketersediaan Pelabuhan	Dinas Perhubungan	70.433.981.993



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Penyeberangan		
			Persentase Meningkatnya Layanan Pelayaran	Dinas Perhubungan	70.433.981.993
			Persentase Meningkatnya Layanan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	70.433.981.993
			Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi dan dalam Kondisi baik	Dinas Perhubungan	70.433.981.993
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.279.838.856
			Cakupan pembinaan atlet muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.279.838.856
			Cakupan pembinaan olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.279.838.856
			Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional yang memperoleh medali emas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.279.838.856
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	368.739.900
			Rehabilitasi Lahan Kritis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	368.739.900
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75.000.000



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75.000.000
			Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.094.110.658
			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.094.110.658
			Rasio Elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.094.110.658
72	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal				



Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	---	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Pendidikan	110.305.000	292.884.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	Dinas Pendidikan	70.320.609.056	75.484.862.641	
				Angka partisipasi kasar (APK) SLB	Dinas Pendidikan	70.320.609.056	75.484.862.641	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	70.320.609.056	75.484.862.641	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	Dinas Pendidikan	70.320.609.056	75.484.862.641	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	Dinas Pendidikan	70.320.609.056	75.484.862.641	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	70.320.609.056	75.484.862.641	
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan	70.320.609.056	75.484.862.641	
				Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	Dinas Pendidikan	70.320.609.056	75.484.862.641	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	794.160.700	795.960.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kesehatan	4.877.127.446	4.862.124.909	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kesehatan	22.000.000	0	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
				Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	22.551.094.270	17.457.798.955	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	76.500.000	76.500.000	
				Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	76.500.000	76.500.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Dinas Kesehatan	76.500.000	76.500.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Dinas Kesehatan	1.006.462.000	1.032.277.200	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	56.852.420	25.935.740	
				Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	12.371.487.019	12.799.776.222	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial	2.616.417.706	2.437.842.506	
				Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Dinas Sosial	2.616.417.706	2.437.842.506	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	2.153.184.447	2.009.723.250	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	2.153.184.447	2.009.723.250	
				Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	2.153.184.447	2.009.723.250	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	2.153.184.447	2.009.723.250	
				Persentase sarana - prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	Dinas Sosial	2.153.184.447	2.009.723.250	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Dinas Sosial	2.153.184.447	2.009.723.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang di kelola	Dinas Sosial	282.861.200	514.153.200	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	75.155.000	5.371.000	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.000.000	57.456.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	248.040.000	236.890.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.030.835.616	14.155.648.766	
				Cakupan pembinaan atlet muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.030.835.616	14.155.648.766	
				Cakupan pembinaan olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.030.835.616	14.155.648.766	
				Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional yang memperoleh medali emas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.030.835.616	14.155.648.766	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kebudayaan	7.139.532.874	7.455.495.575	
				Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Kebudayaan	7.283.217.522	7.570.489.923	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	554.810.718	471.480.718	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	Dinas Kebudayaan	957.689.316	947.302.566	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Dinas Kebudayaan	238.325.228	221.313.228	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	Dinas Kebudayaan	311.834.016	345.663.616	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.998.200	9.998.200	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10.000.000	10.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang tepat waktu dan akurat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.020.679.950	1.395.679.950	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	176.799.300	186.699.300	
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.218.000	170.146.000	
				---	Badan Penghubung Daerah	1.133.123.556	2.462.513.431	
				Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.550.955.819	6.625.256.013	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	537.919.800	468.348.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	193.159.000	193.159.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	134.221.300	121.031.739	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	308.487.500	90.934.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.755.632.880	13.761.522.880	
2	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	---	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	Dinas Sosial	3.395.036.009	3.035.682.928	
				Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	Dinas Sosial	3.395.036.009	3.035.682.928	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	3.395.036.009	3.035.682.928	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	466.217.903	509.898.350	
				Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	466.217.903	509.898.350	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	466.217.903	509.898.350	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	20.103.147.330	19.326.598.950	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	585.000.000	1.074.175.750	
				Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	585.000.000	1.074.175.750	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	585.000.000	1.074.175.750	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	48.800.000	42.879.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	200.000.000	199.800.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	104.849.704	98.183.451	
				Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	104.849.704	98.183.451	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	377.245.597	367.183.661	
				Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	377.245.597	367.183.661	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	135.077.260	124.527.260	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.048.365.570	9.056.285.205	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	641.176.400	631.139.400	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Pariwisata	12.713.119.747	12.534.611.807	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	1.812.990.000	1.698.721.000	
				Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	1.812.990.000	1.698.721.000	
				Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	Dinas Pariwisata	1.812.990.000	1.698.721.000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	9.795.155.692	10.782.556.710	
				Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata	9.795.155.692	10.782.556.710	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	Dinas Pariwisata	330.913.200	329.513.200	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	Dinas Pariwisata	493.199.500	394.899.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	753.737.336	804.109.836	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	5.109.736.500	4.114.274.659	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	5.109.736.500	4.114.274.659	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.446.550.000	2.290.363.500	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.446.550.000	2.290.363.500	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.446.550.000	2.290.363.500	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	249.330.000	242.903.573	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	249.330.000	242.903.573	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	316.500.000	316.500.000	
				Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	316.500.000	316.500.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	726.070.850	709.970.850	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Inflasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.108.943.097	2.918.652.697	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45.846.140	45.846.140	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standaar pada saat dilakukan Pengawasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	496.117.350	777.365.050	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000	350.000.000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	---	Sekretariat Daerah	986.796.540	717.435.542	
3	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	---	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kesehatan	1.839.316.919	1.658.869.200	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Persentase Puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
				Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	2.062.499.400	3.585.484.952	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pelayanan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	144.806.125	144.806.125	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Panjang Jalan Berkondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	60.747.742.000	60.967.813.000	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118	7.531.462.556	
				Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118	7.531.462.556	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengembangan Sistem Pemulihan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118	7.531.462.556	
				Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118	7.531.462.556	
				Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118	7.531.462.556	
				Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118	7.531.462.556	
				Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.035.399.118	7.531.462.556	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.716.333.854	27.242.574.315	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Dokumen Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	488.502.000	441.652.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000	349.400.000	
				Indeks Kualitas Air Laut	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000	349.400.000	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000	349.400.000	
				Indeks Kualitas Udara Ambien	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000	349.400.000	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	150.000.000	150.000.000	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Target Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000.000	75.000.000	
				Target Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75.000.000	75.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Perhubungan	6.269.630.931	6.248.944.495	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	Dinas Perhubungan	1.627.000.406	1.627.000.406	
				Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat (AKDP dan Angkutan Perkotaan)	Dinas Perhubungan	1.627.000.406	1.627.000.406	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	1.627.000.406	1.627.000.406	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	Dinas Perhubungan	70.433.981.993	68.836.462.308	
				Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	70.433.981.993	68.836.462.308	
				Persentase Meningkatnya Layanan Pelayaran	Dinas Perhubungan	70.433.981.993	68.836.462.308	
				Persentase Meningkatnya Layanan Penyeberangan	Dinas Perhubungan	70.433.981.993	68.836.462.308	
				Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi dan dalam Kondisi baik	Dinas Perhubungan	70.433.981.993	68.836.462.308	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.279.838.856	2.164.696.056	
				Cakupan pembinaan atlet muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.279.838.856	2.164.696.056	
				Cakupan pembinaan olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.279.838.856	2.164.696.056	
				Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional yang memperoleh medali emas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.279.838.856	2.164.696.056	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	368.739.900	431.739.900	
				Rehabilitasi Lahan Kritis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	368.739.900	431.739.900	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.000.000	100.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75.000.000	65.092.800	
				Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75.000.000	65.092.800	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75.000.000	65.092.800	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.094.110.658	1.705.405.863	
				Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.094.110.658	1.705.405.863	
				Rasio Elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.094.110.658	1.705.405.863	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	---	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Kesehatan	40.331.971.077	39.316.657.501	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Puskesmas terakreditasi	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
				Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	2.562.339.000	2.413.925.042	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Dinas Kesehatan	16.963.912.161	15.715.064.000	
				Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	16.963.912.161	15.715.064.000	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	Dinas Kesehatan	16.963.912.161	15.715.064.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.515.585.521	8.638.361.852	
					Dinas Sosial	11.527.247.555	11.580.224.987	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	925.760.340	791.532.990	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	13.240.153.886	12.997.033.222	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Kabupaten/Kota yang menggunakan database konsolidasi bersih dari kemendagri sebagai data dasar pelayanan reguler administrasi kependudukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	767.959.149	742.803.149	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	334.406.656	314.756.047	
				Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	334.406.656	314.756.047	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.823.625.722	9.547.100.536	
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	246.432.500	262.932.500	
					Sekretariat Daerah	208.158.650.873	205.912.211.405	
				Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Sekretariat Daerah	244.591.500	226.827.800	
				Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Badan Penghubung Daerah	930.239.000	818.585.402	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	Sekretariat Daerah	1.054.852.320	745.961.500	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Sekretariat Daerah	1.345.830.445	1.154.512.143	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Sekretariat Daerah	107.346.789.294	101.783.008.720	
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	Sekretariat Daerah	602.397.900	851.241.993	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	Sekretariat Daerah	89.999.900	111.905.300	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Sekretariat DPRD	88.820.518.370	92.862.239.309	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	70.513.702.000	64.030.440.061	
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	70.513.702.000	64.030.440.061	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	65.432.462.063	46.263.761.708	
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	616.484.400	616.484.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang tepat waktu dan akurat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	608.452.003.338	567.049.486.380	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Bersertipikat (Tanah)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.035.115.894	2.706.418.354	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	17.873.153.527	14.219.228.470	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Perlindungan dan Pelayanan ASN	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	692.986.800	919.137.000	
				Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.999.981.600	2.051.433.210	
				Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.999.981.600	2.051.433.210	
				Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.999.981.600	2.051.433.210	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	339.998.200	443.865.957	
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.791.293.017	8.761.474.327	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	769.274.550	500.778.684	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	---	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.330.852.361	5.183.467.344	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Peangelolaan Perbatasan yang terealisasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	436.092.200	366.945.689	
				Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang terealisasi	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	416.938.600	210.310.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Badan Penghubung Daerah	198.248.000	100.464.000	
				---	Badan Penghubung Daerah	151.371.913	147.751.113	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	Badan Penghubung Daerah	856.855.951	1.896.505.487	



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, secara umum difokuskan untuk keperluan:

1. Pemenuhan belanja sampai akhir tahun 2022, meliputi:
 - a. Penyesuaian terhadap belanja pemenuhan vaksin berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 Tentang penggunaan sebagian (earmarking) Dana Alokasi Umum atau Bagi Hasil dalam rangka dukungan pendanaan program vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - b. Penyesuaian terhadap penggunaan dana transfer dan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;
 - c. Penyesuaian terhadap belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
2. Pemenuhan Kebutuhan Mendesak dan Bersifat Wajib/Mengikat Tahun 2022.
3. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
4. Penyiapan Rencana Kegiatan Pembangunan fisik Tahun 2023 yang harus dibiayai pada tahun 2022.

BAB IV
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Perubahan Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami Perubahan Tahun Anggaran 2022 tercantum pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
 Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	832.072.910.968	817.461.946.329	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	832.072.910.968	817.461.946.329	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	829.554.605.918	815.069.641.279	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	483.140.109.078	470.558.580.098	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.453.697.159	990.537.116	
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.151.644.750	740.718.800	
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	87.395.000	115.809.500	
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	189.657.409	109.008.816	
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	412.834.249.375	370.349.153.214	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	410.583.323.195	367.992.648.414	
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.550.830.180	1.526.447.000	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	689.826.000	807.097.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Keuangan SKPD			
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.270.000	22.960.000	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	276.400.000	277.300.000	
1.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	276.400.000	277.300.000	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	625.715.575	1.018.835.575	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	537.533.900	682.603.900	
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.265.000	128.265.000	
1.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.916.675	207.966.675	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.574.303.600	2.571.617.200	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.165.000	33.165.000	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	591.571.600	591.571.600	
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.701.700	11.701.700	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	942.651.200	957.779.700	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.904.000	99.904.000	
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	89.640.000	89.640.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	24.977.000	24.977.000	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.991.000	49.991.000	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.222.100	254.222.100	
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	476.480.000	458.665.100	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	380.495.200	817.541.100	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.960.200	360.016.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	126.989.500	
1.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.535.000	330.535.000	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.383.968.867	89.679.243.785	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.570.000	2.570.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	984.936.390	1.352.023.390	
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.035.000	142.935.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.296.427.477	88.181.715.395	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.611.279.302	4.854.352.108	
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.326.000	324.126.000	
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.979.352	400.252.158	
1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.129.973.950	4.129.973.950	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	345.570.436.140	343.665.200.481	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	181.674.686.855	183.802.074.285	
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0	60.000.000	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	15.377.748.356	15.938.283.936	
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.219.925.000	10.484.136.200	
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	2.329.378.000	1.969.636.600	
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	7.799.030.000	5.606.991.600	
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	5.372.730.000	4.736.383.902	
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	3.410.536.000	1.436.882.600	
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.067.531.000	4.214.395.800	
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.883.097.000	1.058.914.600	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.996.409.884	5.870.552.581	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	4.236.129.000	2.294.873.600	
1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.598.297.000	2.235.626.600	
1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.547.145.000	764.134.600	
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	582.610.000	217.800.000	
1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	582.610.000	337.985.600	
1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	362.366.000	247.350.600	
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	362.366.000	142.165.000	
1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	233.376.000	170.122.000	
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	2.255.154.200	8.378.816.700	
1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	189.572.000	189.572.000	
1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5.255.000.000	8.035.871.200	
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	11.989.416.000	6.416.033.929	
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	267.610.000	267.610.000	
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	328.892.200	328.892.200	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	78.628.000	78.628.000	
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	288.030.000	432.030.000	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	100.824.856.215	101.888.384.437	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	151.115.018.305	146.979.145.866	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0	30.000.000	
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	33.387.202.000	29.680.550.255	
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	7.393.902.000	8.241.552.607	
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	973.516.000	1.366.900.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.490.730.000	1.893.480.000	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.411.717.120	3.756.823.319	
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	902.455.000	769.287.000	
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	4.767.218.700	4.316.375.200	
1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	130.177.700	130.177.700	
1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15.500.000.000	18.274.900.000	
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	8.091.586.000	2.547.586.000	
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	374.400.000	374.400.000	
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	380.124.000	380.124.000	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	348.895.000	253.895.000	
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	900.035.000	900.035.000	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	74.063.059.785	74.063.059.785	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	12.780.730.980	12.883.980.330	
1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	30.000.000	
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.184.000.000	1.174.441.200	
1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	370.621.400	
1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	196.000.000	219.924.600	
1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	224.000.000	230.793.100	
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.021.931.000	1.454.642.000	
1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	0	324.253.650	
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	468.000.000	309.796.200	
1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	190.340.000	199.798.200	
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	128.497.800	128.497.800	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	306.454.500	306.454.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	283.243.680	356.493.680	
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	7.778.264.000	7.778.264.000	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	19.974.000	19.974.000	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	9.987.000	9.987.000	
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	9.987.000	9.987.000	
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	9.987.000	9.987.000	
1.01.03.1.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	9.987.000	9.987.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	794.160.700	795.960.700	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	794.160.700	795.960.700	
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	277.243.500	279.043.500	
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	516.917.200	516.917.200	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	29.926.000	29.926.000	
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	19.939.000	19.939.000	
1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	19.939.000	19.939.000	
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	9.987.000	9.987.000	
1.01.05.1.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	9.987.000	9.987.000	
1.01.0.00.0.00.01.0001	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2.518.305.050	2.392.305.050	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.518.305.050	2.392.305.050	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.883.000	197.883.000	
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	197.883.000	197.883.000	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.815.050	116.815.050	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.352.000	34.352.000	
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.917.350	8.917.350	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.725.000	46.725.000	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.095.000	9.095.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.725.700	17.725.700	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.203.607.000	2.077.607.000	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.272.000	161.122.000	
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.500.000	305.500.000	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.699.835.000	1.608.985.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	359.998.951.840	431.873.820.704	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	359.998.951.840	431.873.820.704	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	85.273.270.510	78.407.057.371	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.428.527.759	23.024.211.129	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	393.480.645	288.013.645	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	256.985.045	187.485.045	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.495.600	100.528.600	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.066.578.207	17.787.243.875	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.190.916.968	17.001.207.875	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	875.661.239	786.036.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.095.374.461	1.069.385.109	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.000.000	147.458.249	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.733.000	64.544.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	235.000.000	174.675.160	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	11.578.000	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	36.666.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521.000.000	603.335.000	
1.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.641.461	21.128.700	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391.344.446	325.368.000	
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256.822.200	249.968.000	
1.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.522.246	75.400.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.091.650.000	3.149.730.500	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.640.000	160.300.000	
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.700.000	65.700.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.845.310.000	2.923.730.500	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.100.000	404.470.000	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	385.100.000	394.350.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	10.120.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.454.533.956	41.129.251.491	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	10.188.709.667	9.778.608.586	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Tingkat Daerah Provinsi			
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.000.200.000	4.000.200.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.250.000.000	2.250.000.000	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.938.509.667	3.528.408.586	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	36.579.794.757	31.084.661.788	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100.129.000	128.629.000	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.053.511.648	2.574.360.316	
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	962.432.800	961.848.100	
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	117.034.300	132.036.000	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.834.855.600	672.383.530	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	255.019.600	254.577.700	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.093.533.220	1.273.408.103	
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	67.817.000	67.110.000	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	642.639.220	642.639.220	
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	63.500.000	30.628.000	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	18.000.000	17.504.000	
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	18.000.000	17.860.000	
1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1.209.300.000	1.456.300.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.777.644.269	22.508.210.019	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	348.000.000	347.167.800	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	298.962.617	201.394.417	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	298.962.617	201.394.417	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	387.066.915	64.586.700	
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	340.000.000	18.000.000	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	47.066.915	46.586.700	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13.365.340.395	13.193.451.551	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.739.040.995	12.631.415.151	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.739.040.995	12.631.415.151	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	626.299.400	562.036.400	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	391.037.200	421.037.200	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	235.262.200	140.999.200	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	18.406.400	27.866.000	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	18.406.400	27.866.000	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	18.406.400	27.866.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	1.006.462.000	1.032.277.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	KESEHATAN			
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	794.113.400	819.928.600	
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	794.113.400	819.928.600	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	212.348.600	212.348.600	
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	212.348.600	212.348.600	
1.02.0.00.0.00.02.0002	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	194.366.223.754	267.622.361.929	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	162.693.413.754	237.908.187.995	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.692.004.356	67.377.726.493	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.026.124.356	66.618.862.493	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.650.880.000	743.864.000	
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15.000.000	15.000.000	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.584.000	25.868.900	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.584.000	25.868.900	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.081.840.398	1.714.645.165	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	75.000.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000.000	404.071.816	
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	100.000.000	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.000.000	543.855.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	150.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	31.920.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	706.840.398	409.798.349	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.498.431.200	16.815.031.300	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	50.000.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.874.446.200	6.440.761.500	
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	118.427.530	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.503.985.000	10.205.842.270	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.553.800	358.553.800	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.553.800	58.553.800	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	300.000.000	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	75.000.000.000	151.616.362.337	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	75.000.000.000	151.616.362.337	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.640.820.000	13.691.419.281	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.255.628.000	8.491.463.974	
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.000.000.000	1.004.002.520	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.500.000.000	3.983.757.045	
1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	935.028.000	918.502.908	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	400.000.000	400.000.000	
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	500.000.000	474.759.005	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.785.000.000	1.710.442.496	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	6.198.180.000	5.156.521.507	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.501.180.000	1.113.621.689	
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.697.000.000	4.042.899.818	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100.000.000	8.433.800	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000	8.433.800	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	87.012.000	35.000.000	
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	87.012.000	35.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16.031.990.000	16.022.754.653	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	15.563.990.000	15.594.347.153	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.563.990.000	15.594.347.153	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	468.000.000	428.407.500	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	285.260.000	266.167.500	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	182.740.000	162.240.000	
1.02.0.00.0.00.02.0003	Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud	80.359.457.576	85.844.401.404	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.672.348.415	64.366.348.799	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.050.895	104.186.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.316.895	79.452.900	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.734.000	24.734.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.493.354.782	37.582.900.601	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.914.398.782	37.013.076.601	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	530.796.000	521.664.000	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.160.000	48.160.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.081.300	467.546.300	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.991.300	149.991.300	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.334.000	54.334.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	75.000.000	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	71.100.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.756.000	117.121.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.605.000	994.705.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.605.000	994.705.000	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.006.196.019	1.826.187.900	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.685.000	109.645.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.065.400	199.743.400	
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000	200.000.000	
1.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	43.120.000	7.921.600	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.149.633.719	968.864.000	
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	339.691.900	340.013.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	17.501.060.419	23.390.822.098	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	17.501.060.419	23.390.822.098	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.646.697.000	5.686.488.605	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.053.221.400	4.800.158.605	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	154.002.800	2.221.898.000	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	125.991.000	34.617.600	
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	281.325.600	215.347.663	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	1.295.352.500	1.409.838.523	
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.196.549.500	918.456.819	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	523.038.600	800.700.300	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	523.038.600	800.700.300	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	70.437.000	85.629.700	
1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	70.437.000	85.629.700	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	17.040.412.161	15.791.564.000	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	16.963.912.161	15.715.064.000	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16.963.912.161	15.715.064.000	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	76.500.000	76.500.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	76.500.000	76.500.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	463.048.549.259	423.420.948.371	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	463.048.549.259	423.420.948.371	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	449.958.505.173	411.105.328.371	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.106.716.654	22.971.780.742	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	343.203.640	491.113.640	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.608.500	90.749.600	
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.803.300	1.787.500	
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.489.400	37.025.300	
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	148.484.300	295.413.300	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.347.940	66.137.940	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.217.896.366	16.929.154.097	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.317.208.726	15.500.573.457	
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.815.128.000	1.358.126.000	
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	85.559.640	70.454.640	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.000.000	17.500.000	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.000.000	17.500.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.026.589.792	1.803.578.274	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	448.623.850	771.061.332	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.001.400	30.001.400	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.009.500	100.009.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.537.500	27.537.500	
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.667.542	74.907.542	
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.940.000	37.540.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.810.000	762.521.000	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	456.599.070	656.599.070	
1.03.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.000.000	49.000.000	
1.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	407.599.070	607.599.070	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.865.260.786	2.892.318.661	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.280.200	12.280.200	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	462.040.500	489.346.407	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.390.940.086	2.390.692.054	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.167.000	181.517.000	
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.465.000	156.815.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.702.000	24.702.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.177.270.125	21.614.698.123	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.177.270.125	20.933.228.923	
1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	949.438.000	1.034.391.200	
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.080.367.000	1.663.788.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.02.1.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	1.279.147.500	538.900.000	
1.03.02.1.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	10.486.048.500	10.400.456.158	
1.03.02.1.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	4.735.829.025	5.532.956.492	
1.03.02.1.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.480.195.850	1.589.730.323	
1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	166.244.250	173.006.250	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	681.469.200	
1.03.02.1.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0	681.469.200	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.593.310.790	1.204.198.347	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.593.310.790	1.204.198.347	
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	899.610.290	902.033.927	
1.03.03.1.01.06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	1.598.194.300	206.189.920	
1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	95.506.200	95.974.500	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	144.806.125	144.806.125	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	144.806.125	144.806.125	
1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	144.806.125	144.806.125	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	597.848.500	357.848.100	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	597.848.500	357.848.100	
1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	597.848.500	357.848.100	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	99.040.644.659	87.965.571.005	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	99.040.644.659	87.965.571.005	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	99.040.644.659	87.965.571.005	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	21.467.493.664	20.782.806.563	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21.467.493.664	20.782.806.563	
1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	21.467.493.664	20.782.806.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	274.874.715.731	251.168.070.408	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	274.874.715.731	251.168.070.408	
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.882.442.253	9.113.573.571	
1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	9.070.814.096	9.374.635.718	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.830.804.537	1.823.188.537	
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	107.038.901.480	96.073.631.083	
1.03.10.1.01.07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	32.422.484.946	24.988.336.947	
1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	10.291.663.096	15.951.976.480	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.594.007.096	3.262.111.764	
1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	20.698.522.000	13.726.671.827	
1.03.10.1.01.13	Pembangunan Flyover	60.747.742.000	60.967.813.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	0	167.875.400	
1.03.10.1.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	3.088.600.000	3.047.357.952	
1.03.10.1.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	10.623.044.335	2.431.054.428	
1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4.257.929.026	3.277.073.978	
1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	8.327.760.866	6.962.769.723	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.854.094.365	1.676.518.770	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.142.726.125	1.042.726.125	
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	722.303.575	622.303.575	
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	256.000.000	256.000.000	
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	164.422.550	164.422.550	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	414.998.760	377.198.115	
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	147.034.510	135.160.106	
1.03.11.1.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	123.135.000	111.072.259	
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	144.829.250	130.965.750	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	296.369.480	256.594.530	
1.03.11.1.03.01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	96.581.420	85.969.670	
1.03.11.1.03.02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	199.788.060	170.624.860	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.101.604.560	3.219.030.188	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	162.417.800	162.417.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	162.417.800	162.417.800	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	2.527.791.650	2.521.291.650	
1.03.12.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	2.185.210.698	2.183.410.698	
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	342.580.952	337.880.952	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	154.325.550	178.274.800	
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	154.325.550	178.274.800	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	257.069.560	357.045.938	
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	257.069.560	357.045.938	
1.03.2.10.2.10.01.0001	UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	10.509.451.086	9.855.032.400	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	513.385.836	662.370.036	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.523.500	410.387.700	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.217.600	62.441.600	
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.719.000	50.271.100	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.200.000	37.186.000	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.355.000	50.655.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.031.900	209.834.000	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.659.336	232.659.336	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.659.336	232.659.336	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.203.000	19.323.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	14.320.000	
1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	5.003.000	5.003.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	863.027.000	17.943.594	
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	863.027.000	17.943.594	
1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	863.027.000	17.943.594	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	270.000.000	256.794.000	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	270.000.000	256.794.000	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	270.000.000	256.794.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	8.863.038.250	8.917.924.770	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	8.863.038.250	8.917.924.770	
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	3.888.638.250	4.153.041.497	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.974.400.000	4.764.883.273	
1.03.2.10.2.10.01.0002	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	2.580.593.000	2.460.587.600	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.580.593.000	2.460.587.600	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.325.700	353.123.700	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.500	17.052.000	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.265.200	56.265.200	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.161.000	3.161.000	
1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	138.900.000	138.570.000	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000	138.075.500	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.397.825.300	1.407.021.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pemerintah Daerah			
1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.000.000	370.000.000	
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000	967.957.000	
1.03.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	27.825.300	69.064.900	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.212.000	511.212.000	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.612.000	113.612.000	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.600.000	397.600.000	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.230.000	189.230.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	180.000.000	
1.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.230.000	9.230.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	205.173.956.015	219.300.960.079	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	205.173.956.015	219.300.960.079	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	205.173.956.015	219.300.960.079	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.931.334.055	15.140.681.673	
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.605.393.640	1.027.515.171	
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	530.999.320	452.975.800	
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	595.655.320	574.539.371	
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.485.628.781	7.691.218.593	
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.548.428.781	7.072.018.593	
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	937.200.000	619.200.000	
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	623.546.144	438.837.144	
1.04.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	163.200.000	163.200.000	
1.04.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	281.147.000	175.926.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	99.711.144	99.711.144	
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.056.069.568	809.244.768	
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	217.452.000	217.452.000	
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	531.792.768	531.792.768	
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	60.000.000	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.569.883.122	2.292.588.297	
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	210.437.500	240.437.500	
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.954.200	96.000.000	
1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.198.000	71.198.000	
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	311.558.600	175.169.600	
1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.194.800	88.608.400	
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.160.000	22.080.000	
1.04.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	62.732.000	10.685.000	
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.054.965.350	1.053.727.125	
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	169.075.144	169.075.144	
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	365.607.528	365.607.528	
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	903.742.800	883.712.700	
1.04.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	100.000.000	
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	115.866.000	145.895.000	
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	567.776.700	637.817.700	
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.236.950.000	1.376.250.000	
1.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.700.000	220.000.000	
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.250.000	1.146.250.000	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.120.000	621.315.000	
1.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.560.000	83.560.000	
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.760.000	53.830.000	
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.800.000	57.925.000	
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.000.000	165.000.000	
1.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.000.000	261.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300.000.000	674.204.000	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000	300.000.000	
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	150.000.000	150.000.000	
1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	150.000.000	150.000.000	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	0	374.204.000	
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	374.204.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.156.440.094	2.610.003.815	
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	250.000.000	368.500.820	
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	0	158.851.820	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	50.000.000	9.649.000	
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000	200.000.000	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.906.440.094	2.241.502.995	
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.351.496.820	227.320.000	
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.554.943.274	2.014.182.995	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	180.786.181.866	200.876.070.591	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	180.786.181.866	200.876.070.591	
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	180.786.181.866	200.876.070.591	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	39.705.421.692	37.841.358.673	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	23.154.437.053	21.671.534.265	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	23.154.437.053	21.671.534.265	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.867.543.987	19.037.839.287	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.355.968	124.758.440	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.852.420	25.935.740	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.503.548	98.822.700	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.174.675.879	12.563.423.977	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.724.371.879	12.120.095.977	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	450.304.000	443.328.000	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.811.140	236.352.245	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.141.240	6.141.240	
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.001.000	10.001.000	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.340	27.715.837	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.995.000	14.995.000	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.360.000	9.360.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.313.560	168.139.168	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	200.000.000	
1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.961.940.000	5.750.609.125	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	238.142.000	194.142.000	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	135.000.000	
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.048.000	15.048.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.573.750.000	5.406.419.125	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.761.000	162.695.500	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	50.000.000	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000	80.000.000	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.761.000	26.761.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	5.934.500	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.617.189.726	2.092.305.878	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.933.688.656	1.501.561.528	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.252.453.200	878.844.200	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	264.517.300	264.517.300	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	97.099.150	97.099.150	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	956.660.386	222.607.308	
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	35.793.570	33.793.570	
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	4.700.000	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	343.886.020	315.059.300	
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	264.517.300	264.517.300	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	79.368.720	50.542.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	339.615.050	275.685.050	
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	339.615.050	275.685.050	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	669.703.340	541.389.100	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	669.703.340	393.824.100	
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	99.342.500	99.342.500	
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	294.481.600	294.481.600	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	147.565.000	
1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	147.565.000	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.550.984.639	16.169.824.408	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.550.984.639	16.169.824.408	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.515.585.521	8.638.361.852	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.757.229	316.768.181	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	192.292.500	192.292.500	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.842.279	40.853.231	
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.622.450	83.622.450	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.664.550.139	5.600.585.839	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.297.608.139	5.239.601.839	
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	366.942.000	360.984.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.143.244	718.854.644	
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.091.800	156.155.200	
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.922.544	79.422.544	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.836.500	7.969.500	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.689.900	31.689.900	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	435.602.500	443.617.500	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	144.000.000	
1.05.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	144.000.000	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.103.498.000	1.183.023.201	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.496.000	127.001.120	
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.552.000	45.130.000	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	931.450.000	1.010.892.081	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.636.909	675.129.987	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.590.000	137.460.900	
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	3.388.000	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	507.046.909	534.281.087	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.035.399.118	7.531.462.556	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	379.193.748	401.943.748	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	379.193.748	401.943.748	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	790.337.120	1.130.337.070	
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	250.310.400	495.310.400	
1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	56.902.100	56.902.100	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	132.725.800	232.725.800	
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	350.398.820	345.398.770	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6.816.452.850	5.949.766.338	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	6.461.595.200	5.632.338.688	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	354.857.650	317.427.650	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	49.415.400	49.415.400	
1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	49.415.400	49.415.400	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.900.507.257	20.369.159.861	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	20.900.507.257	20.369.159.861	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	20.900.507.257	20.369.159.861	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.527.247.555	11.580.224.987	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	468.178.512	482.283.123	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.229.900	16.229.900	
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	49.186.764	47.185.950	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	208.050.864	207.350.649	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	194.710.984	211.516.624	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.536.088.616	8.776.563.567	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.963.760.616	8.236.455.567	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	572.328.000	540.108.000	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.440.000	58.001.700	
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	58.440.000	58.001.700	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	17.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	17.000.000	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	987.959.790	882.493.536	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.800.000	20.895.750	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.000.000	31.574.500	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.000.000	86.872.100	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.960.281	78.057.100	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.000.000	10.800.000	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.200.000	16.802.850	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.999.509	637.491.236	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171.144.626	174.126.763	
1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.660.000	58.090.000	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.484.626	116.036.763	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.694.096	857.127.134	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.000.000	19.267.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.300.000	62.655.886	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	776.394.096	775.204.248	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.741.915	332.629.164	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.990.000	163.284.950	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.610.000	57.285.614	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.141.915	112.058.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.616.417.706	2.437.842.506	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2.616.417.706	2.437.842.506	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50.604.720	50.103.600	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	326.860.720	196.363.400	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.238.952.266	2.191.375.506	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.153.184.447	2.009.723.250	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	887.371.745	821.676.902	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	887.371.745	821.676.902	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	910.150.454	866.807.858	
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	318.001.840	290.641.556	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	592.148.614	576.166.302	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	116.277.088	115.151.088	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	116.277.088	115.151.088	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	28.773.200	22.575.200	
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	28.773.200	22.575.200	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	210.611.960	183.512.202	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	116.522.280	99.270.000	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	94.089.680	84.242.202	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.395.036.009	3.035.682.928	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.395.036.009	3.035.682.928	
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.607.172.275	1.352.554.883	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	347.652.584	277.655.103	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.440.211.150	1.405.472.942	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	925.760.340	791.532.990	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	925.760.340	791.532.990	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	397.204.000	338.013.000	
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	241.677.840	178.505.390	
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	286.878.500	275.014.600	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	282.861.200	514.153.200	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	282.861.200	514.153.200	
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	282.861.200	514.153.200	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	32.156.311.936	30.036.327.932	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	32.156.311.936	30.036.327.932	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	27.892.268.120	25.550.012.616	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.567.833.320	23.915.718.616	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.580.000	25.580.000	
2.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.580.000	15.580.000	
2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.915.715.336	21.738.894.532	
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.181.795.336	21.152.734.532	
2.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	733.920.000	586.160.000	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.200.000	83.200.000	
2.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83.200.000	83.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	613.699.384	488.754.488	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.000	13.983.000	
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.999.000	24.978.000	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.425.384	57.523.850	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	20.386.638	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.720.000	18.720.000	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.566.000	353.163.000	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.993.600	91.500.000	
2.07.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	75.000.000	75.000.000	
2.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.993.600	16.500.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.455.331.000	1.314.079.596	
2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1.000.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439.985.000	373.533.596	
2.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.346.000	909.546.000	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.314.000	173.710.000	
2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.530.000	164.250.000	
2.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	9.460.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	50.000.000	57.456.000	
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50.000.000	57.456.000	
2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	50.000.000	57.456.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.222.128.900	687.195.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.192.128.900	657.195.900	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.192.128.900	657.195.900	
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.000.000	30.000.000	
2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.000.000	30.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66.998.500	65.161.000	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	30.000.000	30.000.000	
2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	30.000.000	30.000.000	
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	36.998.500	35.161.000	
2.07.04.1.04.03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	36.998.500	35.161.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	445.826.300	400.825.600	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	212.516.700	180.557.300	
2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	11.540.000	
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	192.516.700	169.017.300	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	233.309.600	220.268.300	
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	95.304.200	87.597.200	
2.07.05.1.03.03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	138.005.400	132.671.100	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	539.481.100	423.655.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	539.481.100	423.655.500	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	276.705.000	216.674.000	
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	186.678.500	146.883.900	
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	76.097.600	60.097.600	
2.07.3.32.0.00.02.0001	UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	3.647.500.800	3.915.301.300	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	167.878.000	170.154.400	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.272.000	11.249.400	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.931.200	1.931.200	
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.063.200	1.105.200	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.277.600	8.213.000	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.110.000	13.750.000	
2.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.110.000	13.750.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.496.000	145.155.000	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.300.000	44.320.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.196.000	100.835.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.479.622.800	3.745.146.900	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.479.622.800	3.745.146.900	
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.479.622.800	3.745.146.900	
2.07.3.32.0.00.02.0002	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	81.690.400	74.041.900	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.690.400	74.041.900	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.721.500	28.772.500	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1.352.600	1.352.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kantor			
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.760.900	1.760.900	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	856.000	856.000	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.752.000	24.803.000	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.574.000	2.574.000	
2.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.574.000	2.574.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.394.900	42.695.400	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.822.900	17.475.800	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.572.000	25.219.600	
2.07.3.32.0.00.02.0003	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam	534.852.616	496.972.116	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	231.477.616	204.467.116	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.573.100	34.000.000	
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.916.000	2.916.000	
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.651.000	3.651.000	
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.947.100	7.150.000	
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.371.000	5.371.000	
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.632.000	1.632.000	
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.056.000	13.280.000	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.586.900	3.500.000	
2.07.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	4.338.400	3.500.000	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.789.616	166.967.116	
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.257.616	51.732.116	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000	14.400.000	
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.132.000	100.835.000	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	303.375.000	292.505.000	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	303.375.000	292.505.000	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	126.000.000	126.000.000	
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	177.375.000	166.505.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.648.407.212	19.831.045.722	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	19.648.407.212	19.831.045.722	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	17.847.543.932	18.066.601.732	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.927.090.606	11.726.341.232	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.025.517	23.279.199	
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.025.517	23.279.199	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.543.520.102	9.265.754.342	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.917.420.102	8.783.936.342	
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	611.100.000	466.818.000	
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.440.000	58.440.000	
2.08.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	58.440.000	58.440.000	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.620.000	60.900.000	
2.08.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115.620.000	60.900.000	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	662.838.600	866.070.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.524.000	13.924.000	
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.569.500	75.662.800	
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.679.800	43.929.300	
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.656.300	67.282.300	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	254.310.000	236.272.500	
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.980.000	29.980.000	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.119.000	399.020.000	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.299.026.387	1.258.755.291	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.390.955	120.195.955	
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.052.000	144.100.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.022.583.432	994.459.336	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.620.000	193.141.500	
2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.110.000	177.391.500	
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.750.000	15.750.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.326.442.065	2.589.600.226	
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	74.280.920	61.115.057	
2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	74.280.920	61.115.057	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	937.014.795	1.026.846.143	
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	470.796.892	516.947.793	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	466.217.903	509.898.350	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.315.146.350	1.501.639.026	
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	203.879.010	203.879.010	
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.111.267.340	1.297.760.016	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	508.344.100	516.123.500	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	156.439.900	237.329.300	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	156.439.900	237.329.300	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	167.252.500	151.240.500	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	167.252.500	151.240.500	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	184.651.700	127.553.700	
2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	155.230.500	98.132.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	29.421.200	29.421.200	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.647.742.469	1.923.371.027	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.328.942.200	1.581.514.202	
2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	477.237.900	409.350.900	
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	851.704.300	1.172.163.302	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	318.800.269	341.856.825	
2.08.04.1.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	318.800.269	341.856.825	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	44.974.300	26.904.655	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	44.974.300	26.904.655	
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	44.974.300	26.904.655	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.009.442.392	953.618.092	
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	694.172.392	652.147.392	
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	694.172.392	652.147.392	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	315.270.000	301.470.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	67.230.000	64.580.200	
2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	149.170.000	139.725.000	
2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	98.870.000	97.165.500	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	383.508.000	330.643.000	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	383.508.000	330.643.000	
2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	188.906.000	149.826.000	
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	194.602.000	180.817.000	
2.08.2.14.0.00.01.0001	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1.800.863.280	1.764.443.990	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.313.063.280	1.270.691.990	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.653.100	70.468.844	
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.263.000	12.475.844	
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.502.500	24.502.500	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.177.600	11.938.000	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.710.000	21.552.500	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.001.224.180	989.339.046	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.084	78.114.950	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	911.224.096	911.224.096	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.186.000	210.884.100	
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.010.000	71.260.000	
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.330.000	7.920.000	
2.08.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.846.000	131.704.100	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	293.547.400	284.902.000	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	112.950.000	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	0	112.950.000	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	129.255.000	171.952.000	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000	41.952.000	
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	93.255.000	130.000.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	194.252.600	208.850.000	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	194.252.600	132.044.000	
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak	0	132.044.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	76.806.000	
2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	76.806.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	20.966.947.330	20.673.453.700	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	20.966.947.330	20.673.453.700	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	20.966.947.330	20.673.453.700	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.103.147.330	19.326.598.950	
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.009.232	119.152.324	
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.298.232	30.023.400	
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.711.000	89.128.924	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.237.999.666	16.259.892.307	
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.391.399.666	15.696.564.307	
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	846.600.000	563.328.000	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.319.900	533.385.787	
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.950.000	7.950.000	
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.369.900	208.457.900	
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	35.000.000	
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	253.977.887	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.103.808.432	2.147.176.872	
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.025.000	120.543.440	
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	48.000.000	
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.931.283.432	1.975.133.432	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.010.100	266.991.660	
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.400.000	227.400.000	
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	34.500.000	
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.610.100	5.091.660	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	615.000.000	1.104.175.750	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	350.000.000	846.000.550	
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	100.000.000	114.808.550	
2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000	731.192.000	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	130.000.000	130.000.000	
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100.000.000	100.000.000	
2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	30.000.000	30.000.000	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	135.000.000	128.175.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	135.000.000	128.175.200	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	48.800.000	42.879.000	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	48.800.000	42.879.000	
2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	48.800.000	42.879.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	200.000.000	199.800.000	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	199.800.000	
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	200.000.000	199.800.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	234.076.198	189.052.848	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	234.076.198	189.052.848	
1.03.2.10.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	234.076.198	189.052.848	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	234.076.198	189.052.848	
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	234.076.198	189.052.848	
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	234.076.198	189.052.848	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	31.824.750.654	28.353.541.115	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.824.750.654	28.353.541.115	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.429.835.854	27.958.626.315	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.416.333.854	26.942.574.315	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.377.610	31.537.150	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.438.650	7.578.000	
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.938.960	23.959.150	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.814.611.896	24.430.820.858	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.462.979.896	24.005.102.858	
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.351.632.000	425.718.000	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.917.300	435.939.259	
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.724.000	20.724.000	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.739.300	116.106.300	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.700.000	57.900.000	
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.520.000	20.520.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.392.000	24.392.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.442.000	191.896.959	
2.11.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.400.000	4.400.000	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.896.017.048	1.835.217.048	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	2.500.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.180.000	15.180.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.876.337.048	1.817.537.048	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.410.000	209.060.000	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.660.000	185.310.000	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.750.000	23.750.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	488.502.000	441.652.000	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	488.502.000	441.652.000	
2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi	488.502.000	441.652.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000	349.400.000	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	300.000.000	300.000.000	
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100.000.000	100.000.000	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	200.000.000	200.000.000	
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	49.400.000	
2.11.03.1.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	49.400.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000	150.000.000	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	150.000.000	
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000	150.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	75.000.000	75.000.000	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	75.000.000	75.000.000	
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	75.000.000	75.000.000	
2.11.3.28.0.00.02.0001	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	394.914.800	394.914.800	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	300.000.000	300.000.000	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000	300.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000	300.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	94.914.800	94.914.800	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	94.914.800	94.914.800	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	94.914.800	94.914.800	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	877.959.149	1.382.791.649	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	877.959.149	1.382.791.649	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	877.959.149	1.382.791.649	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	45.000.000	374.988.500	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	45.000.000	374.988.500	
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	45.000.000	374.988.500	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	65.000.000	265.000.000	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	65.000.000	265.000.000	
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	65.000.000	265.000.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	767.959.149	742.803.149	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	767.959.149	742.803.149	
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	767.959.149	742.803.149	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	31.770.597.473	32.870.810.116	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.770.597.473	32.870.810.116	
2.12.2.13.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.770.597.473	32.870.810.116	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.258.251.573	11.074.833.516	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.398.800	249.737.000	
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.227.500	16.383.000	
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.850.400	37.376.400	
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.320.900	195.977.600	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.854.750.673	8.391.058.641	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.300.110.673	7.959.742.641	
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	554.640.000	431.316.000	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	162.560.000	4.500.000	
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.030.000	4.500.000	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	673.998.500	831.389.275	
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.004.000	5.004.000	
2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.800	112.730.600	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.826.800	50.852.000	
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.600.000	80.000.000	
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.700.000	12.450.000	
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.866.900	570.352.675	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	126.799.600	179.709.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pemerintah Daerah			
2.13.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.799.600	179.709.700	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.894.000	1.230.800.900	
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.744.000	28.330.000	
2.13.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.500.000	30.420.900	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.077.650.000	1.163.050.000	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.850.000	187.638.000	
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.670.000	162.098.000	
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.180.000	25.540.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	90.000.000	45.027.000	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90.000.000	45.027.000	
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	90.000.000	45.027.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	20.422.345.900	21.750.949.600	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.422.345.900	21.750.949.600	
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	17.020.469.800	18.346.073.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	224.719.300	224.719.300	
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	667.194.900	750.194.900	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	606.640.900	606.640.900	
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.903.321.000	1.823.321.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	463.186.385	387.453.675	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	463.186.385	387.453.675	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	463.186.385	387.453.675	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	49.421.000	10.000.000	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	49.421.000	10.000.000	
2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	49.421.000	10.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	413.765.385	377.453.675	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	29.923.900	68.219.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	29.923.900	68.219.900	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	383.841.485	309.233.775	
2.14.04.1.02.02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	166.753.485	122.145.775	
2.14.04.1.02.05	Fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	217.088.000	187.088.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	89.077.807.019	88.067.588.834	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	89.077.807.019	88.067.588.834	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	86.947.525.671	86.007.661.486	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.016.824.620	17.604.126.120	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	421.843.564	407.797.755	
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.652.664	46.652.664	
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	142.277.500	121.364.500	
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.494.000	84.494.000	
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.419.400	155.286.591	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.841.191.189	11.449.236.869	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.030.024.189	10.533.557.978	
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	717.169.500	821.623.647	
2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.842.500	46.842.500	
2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47.155.000	47.212.744	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.000.000	92.000.000	
2.15.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	92.000.000	92.000.000	
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	119.759.136	109.759.136	
2.15.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	73.302.880	63.302.880	
2.15.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	46.456.256	46.456.256	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	514.191.800	434.689.000	
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.800.000	132.800.000	
2.15.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	83.388.000	135.889.000	
2.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	156.003.800	24.000.000	
2.15.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	142.000.000	142.000.000	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.582.507.381	1.662.362.235	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.000	19.995.000	
2.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.275.500	354.642.500	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153.500.000	162.013.700	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.880.000	38.880.000	
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	135.300.000	135.300.000	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	983.556.881	951.531.035	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.484.350	153.484.350	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.484.350	68.484.350	
2.15.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000	85.000.000	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.509.200.000	2.549.089.625	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.000.000	34.000.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.800.000	151.128.500	
2.15.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.000.000	192.000.000	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.155.400.000	2.171.961.125	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.647.200	745.707.150	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	458.032.000	514.691.950	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.730.000	108.730.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.885.200	72.285.200	
2.15.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	50.000.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.627.000.406	1.627.000.406	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.351.696.406	1.351.696.406	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.194.868.000	1.194.868.000	
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	156.828.406	156.828.406	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	137.504.000	137.504.000	
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	69.068.000	69.068.000	
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	68.436.000	68.436.000	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	68.966.000	68.966.000	
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	68.966.000	68.966.000	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	68.834.000	68.834.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	68.834.000	68.834.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	68.303.700.645	66.776.534.960	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	92.462.500	92.462.500	
2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	92.462.500	92.462.500	
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	9.160.336.900	7.720.351.000	
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	9.160.336.900	7.720.351.000	
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	92.606.900	246.591.500	
2.15.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	92.606.900	246.591.500	
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri,	92.441.500	92.441.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	dan Depo Peti Kemas			
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	92.441.500	92.441.500	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	58.865.852.845	57.807.742.836	
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.320.172.300	1.694.292.300	
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	52.121.685.545	50.979.524.357	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	4.423.995.000	5.133.926.179	
2.15.03.1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	0	816.945.624	
2.15.03.1.16.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	0	816.945.624	
2.15.0.00.0.00.01.0001	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	297.483.000	364.077.000	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	297.483.000	364.077.000	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	297.483.000	364.077.000	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	297.483.000	364.077.000	
2.15.0.00.0.00.01.0002	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	431.296.872	422.584.872	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	431.296.872	422.584.872	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	431.296.872	422.584.872	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	431.296.872	422.584.872	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	796.564.601	725.832.601	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	796.564.601	725.832.601	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	796.564.601	725.832.601	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	796.564.601	725.832.601	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	373.293.295	339.381.295	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	373.293.295	339.381.295	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	373.293.295	339.381.295	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	373.293.295	339.381.295	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	231.643.580	208.051.580	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	231.643.580	208.051.580	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	231.643.580	208.051.580	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	231.643.580	208.051.580	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	44.949.714.607	47.531.687.462	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.949.714.607	47.531.687.462	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.949.714.607	47.531.687.462	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.965.930.152	12.469.731.030	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.405.120	166.531.414	
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.734.720	78.591.014	
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.670.400	87.940.400	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.878.136.372	8.939.565.532	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.257.688.372	8.413.229.532	
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	620.448.000	526.336.000	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.220.000	17.000.000	
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.220.000	17.000.000	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	465.212.660	599.407.116	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.721.800	9.721.800	
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.244.000	27.244.000	
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.775.100	78.775.100	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.358.000	40.638.000	
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	49.150.000	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.073.760	393.878.216	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	245.321.200	
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	245.321.200	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.334.250.000	2.355.670.000	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.334.250.000	2.355.670.000	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	101.706.000	146.235.768	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pemerintahan Daerah			
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.600.000	129.129.768	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.106.000	17.106.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	23.733.828.185	27.648.153.775	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	23.733.828.185	27.648.153.775	
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	194.920.320	267.771.570	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.125.845.943	2.366.426.943	
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.635.475.793	2.199.552.363	
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	99.140.220	210.143.200	
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	14.310.670.549	16.535.649.329	
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3.766.164.420	4.357.436.430	
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	92.000.000	80.000.000	
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	773.610.940	895.173.940	
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	736.000.000	736.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.249.956.270	7.413.802.657	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.046.284.060	5.103.825.354	
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.141.560	57.817.060	
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.998.142.500	5.046.008.294	
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	4.203.672.210	2.309.977.303	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Provinsi			
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	998.777.350	898.473.643	
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	155.586.180	288.587.980	
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	779.568.380	911.615.880	
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.241.688.100	83.247.600	
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	28.052.200	128.052.200	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.736.968.832	19.831.923.653	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.736.968.832	19.831.923.653	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.736.968.832	19.831.923.653	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.273.774.230	11.638.352.335	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.246.240	126.246.240	
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.460.320	70.460.320	
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.785.920	55.785.920	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.882.555.872	7.786.979.155	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.233.059.872	7.270.069.155	
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	569.496.000	436.910.000	
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000.000	80.000.000	
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	49.850.284	
2.17.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	49.850.284	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.705.000	83.705.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.705.000	58.705.000	
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	25.000.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	996.674.338	1.465.697.338	
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.007.700	647.690.816	
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.210.000	15.210.000	
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.364.095	119.364.095	
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.000.000	38.000.000	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.092.543	561.432.427	
2.17.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.000.000	74.000.000	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000	27.000.000	
2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000	27.000.000	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.975.502.980	1.877.734.518	
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	325.000.000	322.300.000	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	48.000.000	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.584.502.980	1.489.434.518	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.089.800	221.139.800	
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.319.800	196.369.800	
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.770.000	24.770.000	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	104.000.000	104.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	104.000.000	104.000.000	
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	104.000.000	104.000.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	104.000.000	101.424.500	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	104.000.000	101.424.500	
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	104.000.000	101.424.500	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0	50.000.000	
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	50.000.000	
2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	0	50.000.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.419.964.000	2.419.964.000	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.030.084.650	1.090.200.000	
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.030.084.650	1.090.200.000	
2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.389.879.350	1.329.764.000	
2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1.389.879.350	1.329.764.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	756.078.202	606.076.402	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	756.078.202	606.076.402	
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	652.078.202	606.076.402	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	895.521.380	424.442.375	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	895.521.380	424.442.375	
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	895.521.380	424.442.375	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5.183.631.020	4.487.664.041	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	5.183.631.020	4.487.664.041	
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5.183.631.020	4.487.664.041	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	16.319.535.483	15.607.937.692	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16.319.535.483	15.607.937.692	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16.319.535.483	15.607.937.692	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.807.380.927	13.249.254.413	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.051.840	72.053.840	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.396.032	13.396.032	
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	14.613.216	14.613.216	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.042.592	44.044.592	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.638.798.675	10.144.145.438	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.090.218.675	9.635.777.438	
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	548.580.000	508.368.000	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.220.000	29.220.000	
2.18.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29.220.000	29.220.000	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.444.200	59.837.200	
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.352.200	53.277.200	
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.092.000	6.560.000	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	590.030.782	553.287.454	
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.167.691	6.167.691	
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.633.747	50.901.600	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.926.000	17.926.000	
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	213.696.672	38.696.672	
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.360.076	37.335.076	
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.246.596	402.260.415	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	943.263.152	895.530.652	
2.18.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	484.095.000	458.100.000	
2.18.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	459.168.152	437.430.652	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.103.778	1.349.443.029	
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132.948.192	132.948.192	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.746.250	154.211.257	
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.700.000	76.000.000	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	997.709.336	986.283.580	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.468.500	145.736.800	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.712.500	103.980.800	
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.756.000	8.756.000	
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.000.000	33.000.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	255.063.656	236.103.575	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	150.213.952	137.920.124	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	150.213.952	137.920.124	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	104.849.704	98.183.451	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	104.849.704	98.183.451	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	352.295.130	336.645.130	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	352.295.130	336.645.130	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	273.499.630	62.849.630	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	78.795.500	273.795.500	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	864.781.877	864.840.114	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	95.548.664	141.579.406	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	53.969.258	100.000.000	
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	41.579.406	41.579.406	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	769.233.213	723.260.708	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	334.406.656	314.756.047	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	120.362.677	110.300.741	
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	256.882.920	256.882.920	
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	57.580.960	41.321.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	904.936.633	796.567.200	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	904.936.633	796.567.200	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	589.604.125	547.052.000	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	315.332.508	249.515.200	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	135.077.260	124.527.260	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	135.077.260	124.527.260	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	135.077.260	124.527.260	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	38.486.462.467	38.497.161.549	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	38.486.462.467	38.497.161.549	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	38.486.462.467	38.497.161.549	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.257.122.455	13.214.934.327	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.068.380	20.520.000	
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.991.000	8.511.000	
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.077.380	12.009.000	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.113.713.957	8.877.743.597	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.036.238.957	8.151.961.597	
2.19.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.066.776.000	717.778.000	
2.19.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.699.000	8.004.000	
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	270.000.000	255.000.000	
2.19.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	270.000.000	255.000.000	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	743.045.118	847.201.135	
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.970.156	82.119.800	
2.19.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.985.000	37.209.893	
2.19.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.420.000	74.396.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	386.822.200	379.871.200	
2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.193.400	24.000.000	
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.654.362	249.604.042	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	197.371.900	
2.19.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	0	197.371.900	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.250.949.000	2.161.507.387	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	156.000.000	151.000.000	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.064.000	266.691.387	
2.19.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.835.000	81.075.000	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.662.050.000	1.662.741.000	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.346.000	855.590.308	
2.19.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244.910.000	244.910.000	
2.19.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	579.436.000	517.346.000	
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	93.334.308	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.398.072.200	2.376.900.540	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.398.072.200	2.376.900.540	
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	27.800.000	170.450.000	
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	945.658.800	658.812.800	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar	979.491.000	1.317.664.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Bendera			
2.19.02.1.01.08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	320.840.000	221.124.740	
2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	124.282.400	8.848.600	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	16.885.435.212	21.978.156.682	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	5.183.931.066	4.734.841.466	
2.19.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	2.279.838.856	2.164.696.056	
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	2.904.092.210	2.570.145.410	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.613.361.970	3.047.361.970	
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	2.613.361.970	3.047.361.970	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	57.306.560	40.304.480	
2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	28.653.280	21.853.280	
2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	28.653.280	18.451.200	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	9.030.835.616	14.155.648.766	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	9.030.835.616	14.155.648.766	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	945.832.600	927.170.000	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	945.832.600	927.170.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.04.1.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	945.832.600	927.170.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	114.452.000	132.658.334	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	114.452.000	132.658.334	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	114.452.000	132.658.334	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	114.452.000	132.658.334	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	114.452.000	132.658.334	
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	114.452.000	132.658.334	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	99.350.880	187.922.353	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	99.350.880	187.922.353	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	99.350.880	187.922.353	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	99.350.880	187.922.353	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	49.695.880	126.342.753	
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	49.695.880	126.342.753	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	49.655.000	61.579.600	
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	49.655.000	61.579.600	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	16.815.628.498	16.867.588.703	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	16.815.628.498	16.867.588.703	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	16.815.628.498	16.867.588.703	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.625.617.502	10.905.102.687	
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	198.884.148	151.573.032	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Daerah			
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.475.300	14.475.300	
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	129.209.348	100.519.048	
2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.199.500	36.578.684	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.695.194.374	7.976.517.075	
2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.139.532.874	7.455.495.575	
2.22.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	555.661.500	521.021.500	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	904.594.930	935.961.930	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.249.000	16.249.000	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.842.800	181.842.800	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	423.146.460	412.941.460	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.700.000	29.700.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.656.670	295.228.670	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.049.960	55.828.560	
2.22.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.049.960	55.828.560	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.490.013.898	1.580.013.898	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	105.660.144	105.660.144	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.631.508	446.631.508	
2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.403.150	30.403.150	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	907.319.096	997.319.096	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.880.192	205.208.192	
2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.350.000	42.350.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.910.000	29.910.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.948.192	132.948.192	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.336.555.844	2.163.487.714	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.781.745.126	1.692.006.996	
2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	572.727.728	563.994.748	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.209.017.398	1.128.012.248	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	554.810.718	471.480.718	
2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	554.810.718	471.480.718	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.276.651.344	1.336.052.644	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.276.651.344	1.336.052.644	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	364.642.356	83.549.796	
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	888.022.588	1.252.502.848	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1.687.662.364	1.585.773.614	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	1.687.662.364	1.585.773.614	
2.22.04.1.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	134.936.968	114.248.968	
2.22.04.1.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	595.036.080	524.222.080	
2.22.04.1.01.04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	957.689.316	947.302.566	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	577.307.428	531.508.428	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	441.800.300	410.413.300	
2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	338.982.200	310.195.200	
2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	102.818.100	100.218.100	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	135.507.128	121.095.128	
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	135.507.128	121.095.128	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	311.834.016	345.663.616	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	311.834.016	345.663.616	
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	311.834.016	345.663.616	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	18.935.022.246	18.863.816.835	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.935.022.246	18.863.816.835	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.736.300.276	18.650.726.438	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.106.851.016	16.087.171.444	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.809.670	28.602.248	
2.23.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.809.670	28.602.248	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.097.974.799	12.130.110.553	
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.692.678.299	11.706.242.053	
2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405.296.500	423.868.500	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.998.200	9.998.200	
2.23.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.998.200	9.998.200	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	455.812.847	567.388.375	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.215	9.993.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.922.000	26.522.000	
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.561.175	258.641.175	
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.984.800	21.291.000	
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.999.650	9.880.000	
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.345.007	241.060.600	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.224.200.000	3.104.265.015	
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	854.000.000	760.999.765	
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.367.200.000	2.340.265.250	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.055.500	246.807.053	
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	46.452.135	
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.519.000	114.071.918	
2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.536.500	86.283.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.287.951.220	2.249.489.180	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.119.278.200	2.078.379.946	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	198.808.400	198.808.400	
2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	91.600.000	88.800.000	
2.23.02.1.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	200.000.000	193.627.600	
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	0	9.000.096	
2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat	1.522.869.800	1.482.143.850	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Daerah Provinsi			
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	106.000.000	106.000.000	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	168.673.020	171.109.234	
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	168.673.020	171.109.234	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	341.498.040	314.065.814	
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	341.498.040	314.065.814	
2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	138.519.220	127.620.994	
2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	202.978.820	186.444.820	
2.23.2.24.0.00.02.0001	UPT PERPUSTAKAAN	198.721.970	213.090.397	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	198.721.970	213.090.397	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.781.770	152.155.059	
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.722.000	2.722.000	
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.729.300	25.265.549	
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.148.470	18.883.710	
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.102.600	7.102.600	
2.23.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.752.000	3.756.000	
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.327.400	94.425.200	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.982.200	51.681.500	
2.23.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	400.000	
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.582.200	51.281.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.958.000	9.253.838	
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.920.000	7.627.838	
2.23.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.038.000	1.626.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	723.402.078	657.143.928	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	723.402.078	657.143.928	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	723.402.078	657.143.928	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	600.020.978	555.842.128	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	149.866.300	168.205.600	
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	9.866.500	9.866.500	
2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	139.999.800	158.339.100	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	163.465.000	123.277.150	
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	163.465.000	123.277.150	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	286.689.678	264.359.378	
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	9.771.878	9.771.878	
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	276.917.800	254.587.500	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	123.381.100	101.301.800	
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	123.381.100	101.301.800	
2.24.03.1.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	123.381.100	101.301.800	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	54.857.220.082	54.303.479.604	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	54.857.220.082	54.303.479.604	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.106.067.991	46.475.147.726	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.510.595.444	28.111.110.843	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.812.238	288.667.144	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	95.244.820	135.172.800	
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.339.598	109.342.524	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.227.820	44.151.820	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.442.421.084	21.589.435.311	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.103.047.084	20.441.839.311	
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.339.374.000	1.147.596.000	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	70.000.000	
3.25.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000	70.000.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.108.246.250	2.346.374.710	
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	850.523.350	842.084.410	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.589.000	47.344.000	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.835.200	125.634.200	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.585.000	31.037.100	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	280.440.000	314.760.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.870.000	13.396.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	659.507.600	947.185.000	
3.25.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.896.100	24.934.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.276.375.872	3.378.589.728	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.331.000	40.637.500	
3.25.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	253.618.500	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.232.044.872	3.084.333.728	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.740.000	438.043.950	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	378.340.000	404.253.950	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000	33.790.000	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	197.330.100	193.182.800	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	178.227.100	147.097.100	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	178.227.100	147.097.100	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	19.103.000	46.085.700	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	19.103.000	46.085.700	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.504.469.100	9.334.728.455	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	9.117.881.020	9.125.803.655	
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	69.515.450	69.518.450	
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	9.048.365.570	9.056.285.205	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	177.176.400	164.502.400	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30	177.176.400	164.502.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	GT			
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	209.411.680	44.422.400	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	209.411.680	44.422.400	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.656.551.559	6.935.826.634	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	140.100.050	125.669.050	
3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	140.100.050	125.669.050	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7.516.451.509	6.810.157.584	
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.687.000	5.687.000	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3.016.262.350	2.249.156.054	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.652.017.840	1.795.046.824	
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.708.000	22.709.000	
3.25.04.1.05.08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.819.776.319	2.737.558.706	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	194.332.600	996.741.939	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	194.332.600	996.741.939	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	194.332.600	996.741.939	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.042.789.188	903.557.055	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	414.712.655	527.806.905	
3.25.06.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	220.770.000	
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	224.241.555	165.444.305	
3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	190.471.100	141.592.600	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	269.478.450	264.402.450	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	269.478.450	264.402.450	
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	358.598.083	111.347.700	
3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	358.598.083	111.347.700	
3.25.0.00.0.00.01.0001	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS	315.858.492	305.858.492	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	223.949.444	213.949.444	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.027.200	11.027.200	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.827.200	2.827.200	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.200.000	8.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.922.244	202.922.244	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.499.956	3.499.956	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.422.288	199.422.288	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	91.909.048	91.909.048	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	91.909.048	91.909.048	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	91.909.048	91.909.048	
3.25.0.00.0.00.01.0002	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA	684.154.334	726.164.469	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	684.154.334	718.208.169	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.896.410	85.932.314	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	24.055.900	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.806.410	23.846.414	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.090.000	38.030.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.257.924	620.923.855	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.072.684	19.941.075	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	650.185.240	600.982.780	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	11.352.000	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	11.352.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0	7.956.300	
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	7.956.300	
3.25.03.1.10.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran	0	7.956.300	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	sampai dengan 10 GT			
3.25.0.00.0.00.01.0003	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA	490.382.640	583.619.688	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	484.385.640	577.622.688	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.335.240	425.572.288	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.335.240	425.572.288	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.050.400	152.050.400	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.810.400	81.810.400	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.240.000	70.240.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.997.000	5.997.000	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	5.997.000	5.997.000	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	5.997.000	5.997.000	
3.25.0.00.0.00.01.0004	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN	1.607.787.679	1.552.787.679	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.114.406.345	1.118.857.143	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.390.625	104.529.701	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.312.800	1.312.800	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.686.000	52.408.901	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.200.000	3.200.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.600.000	9.600.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.591.825	38.008.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.049.015.720	1.008.327.442	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.310.000	41.310.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.006.205.720	965.517.442	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000	6.000.000	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.000.000	6.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	117.130.788	124.478.290	
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	117.130.788	124.478.290	
3.25.03.1.10.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	117.130.788	124.478.290	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	376.250.546	309.452.246	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	376.250.546	309.452.246	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	376.250.546	309.452.246	
3.25.0.00.0.00.01.0005	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	1.041.446.698	1.041.446.698	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	986.390.448	965.621.698	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.625.000	27.070.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.625.000	27.070.000	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	185.500.000	185.500.000	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.500.000	185.500.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784.265.448	753.051.698	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	15.987.150	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.578.400	82.527.500	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.687.048	654.537.048	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	36.056.250	46.425.000	
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36.056.250	46.425.000	
3.25.03.1.10.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	36.056.250	46.425.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.000.000	29.400.000	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	19.000.000	29.400.000	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	19.000.000	29.400.000	
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD BALAI BENIH IKAN	1.955.501.600	1.945.464.600	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.314.325.200	1.314.325.200	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83.200.000	83.200.000	
3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	83.200.000	83.200.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.885.200	1.119.885.200	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.685.200	225.685.200	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	894.200.000	894.200.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.240.000	111.240.000	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.240.000	111.240.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	641.176.400	631.139.400	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	641.176.400	631.139.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	527.994.400	527.994.400	
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	113.182.000	103.145.000	
3.25.0.00.0.00.01.0007	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	702.612.384	702.612.288	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	697.846.384	673.693.288	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.568.000	54.889.000	
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	570.000	3.000.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.998.000	51.889.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.278.384	618.804.288	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.682.000	108.682.000	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	576.596.384	510.122.288	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.766.000	28.919.000	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	4.766.000	28.919.000	
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	4.766.000	28.919.000	
3.25.0.00.0.00.01.0008	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	953.408.264	970.377.964	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	943.411.864	943.411.864	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85.800.000	85.800.000	
3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	85.800.000	85.800.000	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.913.000	11.913.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.913.000	11.913.000	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.098.864	771.098.864	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.998.864	446.998.864	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.100.000	324.100.000	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.600.000	74.600.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.600.000	74.600.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.996.400	26.966.100	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	9.996.400	26.966.100	
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	9.996.400	26.966.100	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	25.145.378.139	25.740.302.217	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	25.145.378.139	25.740.302.217	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	25.145.378.139	25.740.302.217	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.713.119.747	12.534.611.807	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286.280.000	266.585.675	
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.993.000	105.694.500	
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.665.500	54.554.675	
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.621.500	106.336.500	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.709.221.795	9.537.382.763	
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.848.274.795	9.060.080.763	
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	835.947.000	452.302.000	
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	25.000.000	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	919.087.869	1.057.956.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.425.200	164.898.400	
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157.173.800	156.402.000	
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	548.488.869	736.656.200	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.319.000	122.509.300	
3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.319.000	122.509.300	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.409.065.083	1.298.401.469	
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	7.500.000	
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.800.000	89.200.000	
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.305.765.083	1.201.701.469	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.146.000	251.776.000	
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.780.000	41.780.000	
3.26.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.576.000	154.576.000	
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.790.000	55.420.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.812.990.000	1.698.721.000	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	168.280.000	168.280.000	
3.26.02.1.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	168.280.000	168.280.000	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.294.128.000	1.218.860.000	
3.26.02.1.02.01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	171.176.000	171.176.000	
3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.122.952.000	1.047.684.000	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	171.590.000	171.590.000	
3.26.02.1.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	171.590.000	171.590.000	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah	178.992.000	139.991.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	49.892.000	49.892.000	
3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	129.100.000	90.099.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	9.795.155.692	10.782.556.710	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	9.795.155.692	10.782.556.710	
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	7.914.821.500	8.676.301.518	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.356.342.000	1.687.142.000	
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	523.992.192	419.113.192	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	330.913.200	329.513.200	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	176.413.200	176.413.200	
3.26.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	176.413.200	176.413.200	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	154.500.000	153.100.000	
3.26.04.1.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	106.160.000	106.160.000	
3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	48.340.000	46.940.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	493.199.500	394.899.500	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	294.502.000	196.202.000	
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100.000.000	1.700.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	194.502.000	194.502.000	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	198.697.500	198.697.500	
3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	98.697.500	98.697.500	
3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	100.000.000	100.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.875.853.836	7.768.151.568	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	8.875.853.836	7.768.151.568	
2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	7.013.116.500	5.860.585.959	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.550.736.500	3.550.466.659	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.362.892.500	3.210.417.479	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.362.892.500	3.210.417.479	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.187.844.000	340.049.180	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.187.844.000	340.049.180	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.946.550.000	1.790.363.500	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1.946.550.000	1.790.363.500	
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.946.550.000	1.790.363.500	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	199.330.000	203.255.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	199.330.000	203.255.800	
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	199.330.000	203.255.800	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	316.500.000	316.500.000	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	316.500.000	316.500.000	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	316.500.000	316.500.000	
2.09.3.27.0.00.02.0001	UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN	863.427.000	903.783.273	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	313.427.000	364.135.500	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.226.600	152.935.100	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	2.000.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	110.351.500	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.226.600	32.583.600	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.170.400	129.170.400	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.170.400	96.170.400	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.000.000	33.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.030.000	82.030.000	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.140.000	28.140.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.890.000	47.890.000	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	6.000.000	6.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Lainnya			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	500.000.000	500.000.000	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	500.000.000	500.000.000	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	500.000.000	500.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	50.000.000	39.647.773	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	50.000.000	39.647.773	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	50.000.000	39.647.773	
2.09.3.27.0.00.02.0002	UPT BALAI BENIH INDUK PERTANIAN	999.310.336	1.003.782.336	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	440.310.336	439.974.336	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.129.600	50.813.600	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.257.100	4.257.100	
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.994.000	11.994.000	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.994.500	9.994.500	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	900.000	900.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.984.000	22.668.000	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.000	279.000.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.000.000	93.000.000	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.000.000	186.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	107.180.736	110.160.736	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pemerintahan Daerah			
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.181.636	70.161.636	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.249.100	31.249.100	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.750.000	8.750.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	559.000.000	563.808.000	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	559.000.000	563.808.000	
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	31.312.000	38.320.000	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	370.606.000	368.406.000	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	157.082.000	157.082.000	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	517.661.900	622.046.900	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	517.661.900	622.046.900	
2.11.3.28.0.00.02.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.000.000	163.000.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0	63.000.000	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	0	63.000.000	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	0	63.000.000	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	100.000.000	100.000.000	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100.000.000	100.000.000	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani	50.000.000	50.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Hutan			
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	50.000.000	50.000.000	
2.11.3.28.0.00.02.0002	UPTD KPHP UNIT I KARIMUN	48.117.800	48.117.800	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	48.117.800	48.117.800	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	48.117.800	48.117.800	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	48.117.800	48.117.800	
2.11.3.28.0.00.02.0003	UPTD KPHP UNIT III LINGGA	48.922.000	48.922.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	48.922.000	48.922.000	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	48.922.000	48.922.000	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	48.922.000	48.922.000	
2.11.3.28.0.00.02.0004	UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG	56.251.900	97.636.900	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	41.385.000	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	41.385.000	
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	41.385.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	56.251.900	56.251.900	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	56.251.900	56.251.900	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	56.251.900	56.251.900	
2.11.3.28.0.00.02.0005	UPTD KPHP UNIT V NATUNA	53.494.000	53.494.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	53.494.000	53.494.000	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	53.494.000	53.494.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	53.494.000	53.494.000	
2.11.3.28.0.00.02.0006	UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS	80.563.000	80.563.000	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	80.563.000	80.563.000	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	80.563.000	80.563.000	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	80.563.000	80.563.000	
2.11.3.28.0.00.02.0007	UPTD KPHL UNIT II BATAM	130.313.200	130.313.200	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	130.313.200	130.313.200	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	80.313.200	80.313.200	
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	80.313.200	80.313.200	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000	50.000.000	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	50.000.000	50.000.000	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	25.249.326.352	24.234.455.233	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	25.249.326.352	24.234.455.233	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	25.249.326.352	24.234.455.233	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.008.938.290	12.723.820.265	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.726.000	149.040.600	
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	136.726.000	149.040.600	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.276.279.722	9.787.461.436	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.628.829.722	9.341.655.936	
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	489.600.000	291.548.000	
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	157.850.000	154.257.500	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.701.000	94.800.000	
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.800.000	36.800.000	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.901.000	58.000.000	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	772.953.568	1.052.771.479	
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.798.936	230.714.236	
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.724.432	112.594.432	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.678.200	76.709.200	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.752.000	632.753.611	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.316.350.000	1.302.694.750	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.316.350.000	1.302.694.750	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.928.000	337.052.000	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.430.000	247.220.000	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.070.000	39.754.000	
3.29.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000	16.650.000	
3.29.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.428.000	33.428.000	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	249.999.800	210.612.400	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100.000.000	85.145.800	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah	100.000.000	85.145.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	pada Cekungan Air Tanah			
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	149.999.800	125.466.600	
3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	74.999.800	60.373.800	
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	75.000.000	65.092.800	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	3.091.421.924	3.031.329.680	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3.091.421.924	3.031.329.680	
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	83.241.000	72.546.000	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	2.784.234.924	2.734.837.680	
3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	145.324.000	155.324.000	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	78.622.000	68.622.000	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	8.898.966.338	8.268.692.888	
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16.940.000	16.940.000	
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16.940.000	16.940.000	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	104.845.000	104.845.000	
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	54.845.000	54.845.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	65.715.000	65.715.000	
3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	37.500.000	37.500.000	
3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	28.215.000	28.215.000	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	8.711.466.338	8.081.192.888	
3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2.094.110.658	1.705.405.863	
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	118.492.700	47.438.000	
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.344.530.980	6.170.672.025	
3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	154.332.000	157.677.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	17.468.790.699	18.262.459.929	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.468.790.699	18.262.459.929	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.468.790.699	18.262.459.929	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.999.287.412	13.737.518.392	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.464.350	169.464.350	
3.30.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000	
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.464.350	139.464.350	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.567.056.274	9.020.579.259	
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.142.496.274	8.599.371.259	
3.30.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	424.560.000	421.208.000	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	897.865.580	833.497.912	
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.676.900	84.851.900	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.040.000	46.040.000	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	738.148.680	693.606.012	
3.30.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	54.000.000	9.000.000	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.876.290.308	3.008.405.000	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.800.000	299.800.000	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.688.490.308	2.706.605.000	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.610.900	705.571.871	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.350.000	9.188.671	
3.30.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.432.500	262.932.500	
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.828.400	433.450.700	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	726.070.850	709.970.850	
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan	726.070.850	709.970.850	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	726.070.850	709.970.850	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.108.943.097	2.918.652.697	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.108.943.097	2.918.652.697	
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	140.825.600	117.535.200	
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.968.117.497	2.801.117.497	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	138.371.990	118.952.940	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	138.371.990	118.952.940	
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	46.395.800	46.395.800	
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	46.130.050	26.711.000	
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	45.846.140	45.846.140	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	496.117.350	777.365.050	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	749.580.000	
3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	450.000.000	749.580.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	46.117.350	27.785.050	
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	46.117.350	27.785.050	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.625.506.258	4.339.689.739	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.625.506.258	4.339.689.739	
3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.625.506.258	4.339.689.739	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.533.898.558	4.283.868.139	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.533.898.558	4.283.868.139	
3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	152.692.600	302.692.600	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	350.000.000	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.043.530.833	2.691.382.734	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.139.792.805	939.792.805	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	91.607.700	55.821.600	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	91.607.700	55.821.600	
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	46.131.900	29.563.200	
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	45.475.800	26.258.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	262.042.800	30.000.000	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	262.042.800	30.000.000	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	262.042.800	30.000.000	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	10.000.000	10.000.000	
3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	10.000.000	10.000.000	
3.32.02.1.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	10.000.000	10.000.000	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	10.000.000	10.000.000	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000	10.000.000	
3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000	10.000.000	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	242.042.800	10.000.000	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	242.042.800	10.000.000	
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	242.042.800	10.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	328.911.643.522	319.745.592.291	
4.01.4.01.4.01.01.0000	Sekretariat Daerah	327.981.404.522	318.927.006.889	
4.01.4.01.4.01.01.0006	Biro Perekonomian dan Pembangunan	6.410.818.690	5.377.257.060	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.201.891.900	3.606.757.868	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.964.400	148.964.400	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	85.000.000	85.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.964.400	63.964.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	489.364.300	412.436.300	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.630.000	174.465.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.983.000	95.220.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	142.751.300	142.751.300	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.763.688.000	1.262.747.027	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.676.000	5.676.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	166.470.700	166.470.700	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.436.500	81.883.500	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	88.240.000	18.240.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.410.864.800	990.476.827	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	326.611.200	290.946.141	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	59.780.000	129.882.841	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266.831.200	161.063.300	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.213.200.000	1.213.200.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	42.000.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000	96.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.073.200.000	1.073.200.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.064.000	278.464.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.564.000	237.864.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	40.600.000	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	986.796.540	717.435.542	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	448.147.940	351.287.940	
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	88.159.340	81.299.340	
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	359.988.600	269.988.600	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	247.402.800	171.455.230	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	82.151.320	56.097.000	
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	82.659.940	33.212.440	
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	82.591.540	82.145.790	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	291.245.800	194.692.372	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	81.341.380	70.922.000	
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	128.349.440	122.324.372	
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	81.554.980	1.446.000	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.222.130.250	1.053.063.650	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	852.130.350	710.126.350	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	409.986.700	289.148.700	
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	140.000.000	140.000.000	
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	302.143.650	280.977.650	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	369.999.900	342.937.300	
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	90.000.000	90.000.000	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	89.999.900	111.905.300	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	190.000.000	141.032.000	
4.01.5.06.5.07.01.0001	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.445.040.945	3.205.040.945	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.099.210.500	2.050.528.802	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.072.000	21.072.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.072.000	21.072.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	865.918.400	816.951.502	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.116.650	47.116.650	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.382.800	61.097.700	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.514.250	55.514.250	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.960.000	18.960.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.135.000	31.341.853	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635.809.700	602.921.049	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.120.100	93.485.300	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.120.100	93.485.300	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.020.000	962.940.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	840.000	840.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.080.000	88.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	874.100.000	874.100.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.080.000	156.080.000	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.140.000	146.140.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000	9.940.000	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.345.830.445	1.154.512.143	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	365.545.500	328.601.600	
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	46.399.500	27.259.548	
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	232.430.000	220.135.602	
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	86.716.000	81.206.450	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	624.539.500	495.595.600	
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	46.401.100	38.593.800	
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	75.838.000	75.838.000	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	502.300.400	381.163.800	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	355.745.445	330.314.943	
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	179.586.720	179.586.720	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	85.420.725	73.920.225	
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	90.738.000	76.807.998	
4.01.5.06.5.07.01.0002	Biro Kesejahteraan Rakyat	110.037.656.122	104.156.812.380	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.690.866.828	2.373.803.660	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.448.500	22.808.500	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.448.500	22.808.500	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.436.800	78.436.800	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78.436.800	78.436.800	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.261.200	596.862.200	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.721.300	144.327.800	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	428.539.900	452.534.400	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	466.810.968	366.631.800	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	264.401.500	216.551.500	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.409.468	150.080.300	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.424.016.160	1.187.867.160	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	283.955.200	93.956.200	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.020.000	67.020.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.073.040.960	1.026.890.960	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.893.200	121.197.200	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.893.200	121.197.200	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	107.346.789.294	101.783.008.720	
4.01.04.1.01	Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	100.131.555.063	95.110.712.240	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	76.567.653.340	77.987.653.340	
4.01.04.1.01.02	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	23.563.901.723	17.123.058.900	
4.01.04.1.02	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	6.985.944.231	6.503.337.480	
4.01.04.1.02.01	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	6.673.785.481	6.250.384.480	
4.01.04.1.02.02	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	235.728.750	206.523.000	
4.01.04.1.02.03	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	76.430.000	46.430.000	
4.01.04.1.03	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	229.290.000	168.959.000	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	76.430.000	46.429.000	
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan	76.430.000	76.100.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	76.430.000	46.430.000	
4.01.5.06.5.07.01.0005	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.387.614.200	3.414.987.915	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.785.216.300	2.563.745.922	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.650.000	28.539.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.650.000	28.539.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	50.000.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	970.817.290	983.352.690	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.999.400	19.999.400	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.594.000	86.864.100	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.824.100	150.824.100	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.100.590	30.004.090	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.560.000	13.560.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	7.550.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	652.739.200	674.551.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.360.390.000	1.255.640.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	6.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.590.000	9.090.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.800.000	28.800.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.284.000.000	1.211.750.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.359.010	246.214.232	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.630.000	96.739.832	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.780.000	41.780.000	
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.694.400	107.694.400	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	602.397.900	851.241.993	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	181.450.000	561.177.293	
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	48.400.000	48.400.000	
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	90.780.000	478.915.086	
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	42.270.000	33.862.207	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	280.320.200	234.064.700	
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	48.400.000	48.400.000	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	183.520.200	143.742.200	
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	48.400.000	41.922.500	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	140.627.700	56.000.000	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000	56.000.000	
4.01.5.06.5.07.01.0008	Biro Organisasi	2.832.732.980	2.331.271.873	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.777.880.660	1.585.310.373	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.232.640	79.232.640	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.232.640	79.232.640	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.686.000	84.800.800	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	88.686.000	84.800.800	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	794.329.280	700.622.533	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.718.280	83.610.213	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.981.045	34.981.045	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.400.000	23.400.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	652.229.955	558.631.275	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.400.000	579.250.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.600.000	45.600.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	579.800.000	533.650.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.404.400	141.404.400	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.404.400	141.404.400	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.054.852.320	745.961.500	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	287.746.160	213.196.980	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	185.817.600	118.843.600	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	29.228.480	21.653.300	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	72.700.080	72.700.080	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	767.106.160	532.764.520	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	256.738.640	147.014.640	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	95.578.880	61.946.880	
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	29.138.160	22.419.000	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	148.776.480	108.728.000	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	236.874.000	192.656.000	
4.01.5.06.5.07.01.0009	Biro Administrasi Pimpinan	10.296.426.674	10.528.428.280	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.296.426.674	10.528.428.280	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.643.300	253.879.600	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.464.000	139.700.300	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.127.500	87.127.500	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.051.800	27.051.800	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.072.000	104.072.000	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.072.000	104.072.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.167.171.000	1.405.205.945	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	50.000.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.270.000	170.839.500	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.396.000	104.529.200	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	923.505.000	1.079.837.245	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.404.775.500	2.364.335.500	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	20.060.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.725.500	142.725.500	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.000.000	164.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.046.050.000	2.037.550.000	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.770.793.460	1.706.640.006	
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	235.600.000	245.600.000	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.219.728.460	1.155.575.006	
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	315.465.000	305.465.000	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	4.577.971.414	4.694.295.229	
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2.055.486.194	2.189.912.833	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.766.356.936	1.729.876.590	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	756.128.284	774.505.806	
4.01.5.06.5.07.01.0011	Biro Hukum	3.256.172.200	3.217.258.268	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	940.068.000	963.743.487	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.438.000	14.438.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.438.000	14.438.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	40.000.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	40.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.644.000	262.644.000	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.200.000	65.200.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	10.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.444.000	152.444.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.986.000	556.661.487	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.506.000	9.506.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.480.000	535.155.487	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000	90.000.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	75.000.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.316.104.200	2.253.514.781	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.623.406.000	1.556.206.581	
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	878.328.000	902.288.000	
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	217.982.000	172.605.481	
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	208.746.000	196.746.000	
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	318.350.000	284.567.100	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	692.698.200	697.308.200	
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	251.896.000	298.146.000	
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	440.802.200	399.162.200	
4.01.5.06.5.07.01.0012	Biro Umum	188.314.942.711	186.695.950.168	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	188.314.942.711	186.695.950.168	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.375.500	71.385.500	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.375.500	71.385.500	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.319.033.112	65.716.118.542	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.206.323.612	61.503.701.792	
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.309.644.000	3.359.351.250	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	434.033.500	434.033.500	
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	170.065.000	170.065.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.000.000	45.000.000	
4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	45.000.000	45.000.000	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108.967.000	158.967.000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.504.631.500	1.218.153.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	52.887.000	52.887.000	
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	605.178.000	605.178.000	
4.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	163.448.500	212.648.500	
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.277.000	44.277.000	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	638.841.000	303.163.000	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	897.571.200	965.130.200	
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	91.808.800	91.808.800	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	400.100.000	425.100.000	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36.479.300	36.479.300	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.500.000	95.059.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	210.748.500	210.748.500	
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105.934.600	105.934.600	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.133.425.921	28.316.508.185	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.797.910.871	4.939.740.871	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	705.540.000	705.540.000	
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.320.349.200	9.970.358.700	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	226.847.000	251.847.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78.658.100	78.658.100	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.112.296.150	10.171.155.114	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.518.073.500	1.768.073.500	
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	313.674.500	313.674.500	
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	60.076.600	117.460.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Elektronik pada SKPD			
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.629.748.602	24.565.046.103	
4.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.436.030.000	1.436.030.000	
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.614.809.102	19.403.309.103	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	578.909.500	3.725.707.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.170.241.873	33.673.961.873	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	814.115.200	839.365.200	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.811.355.799	8.211.355.799	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.516.968.000	8.115.968.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.027.802.874	16.507.272.874	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.697.804.201	21.159.300.201	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	622.984.900	622.984.900	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.301.635.767	7.751.635.767	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	194.935.000	194.935.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.105.795.525	6.105.785.525	
4.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	742.611.325	904.116.325	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.729.841.684	5.579.842.684	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.639.938.210	2.682.789.568	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	322.983.360	226.238.124	
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	176.249.850	276.249.850	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140.705.000	140.705.000	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.000.000.000	2.039.596.594	
4.01.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.284.138.492	7.360.522.396	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.100.554.624	3.201.938.528	
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.433.991.940	2.433.991.940	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.749.591.928	1.724.591.928	
4.01.01.1.13	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	967.034.100	967.034.100	
4.01.01.1.13.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	967.034.100	967.034.100	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	930.239.000	818.585.402	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	930.239.000	818.585.402	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	930.239.000	818.585.402	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	835.902.000	742.420.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	835.902.000	742.420.000	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.337.000	76.165.402	
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.337.000	76.165.402	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	159.334.220.370	156.892.679.370	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	159.334.220.370	156.892.679.370	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	159.334.220.370	156.892.679.370	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.820.518.370	92.862.239.309	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	559.224.500	1.194.016.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.224.500	302.373.000	
4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	110.000.000	245.763.000	
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	110.000.000	274.246.000	
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	75.000.000	
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000	296.634.500	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.269.887.474	43.389.044.517	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.179.151.474	41.946.308.517	
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	767.736.000	867.736.000	
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.500.000	203.000.000	
4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	110.000.000	174.000.000	
4.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	97.500.000	198.000.000	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000.000	468.761.600	
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000	199.999.600	
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000	33.250.000	
4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	235.512.000	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.982.030.096	26.162.836.110	
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	623.717.000	2.779.437.110	
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.883.399.096	14.883.399.000	
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000.000	8.500.000.000	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.542.881.100	4.885.979.174	
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	369.950.400	1.467.375.200	
4.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.850.100.000	2.850.100.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.950.342.000	335.460.200	
4.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.648.700	233.043.774	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.170.413.500	7.609.933.500	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.431.113.500	1.870.633.500	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.739.300.000	5.739.300.000	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.785.881.700	7.232.604.975	
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.893.500.000	3.312.252.000	
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.170.000	515.380.000	
4.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	376.093.800	366.116.175	
4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.334.117.900	3.038.856.800	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1.315.000.000	1.423.862.933	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	65.000.000	119.862.933	
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	650.000.000	650.000.000	
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	600.000.000	654.000.000	
4.02.01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	495.200.000	495.200.000	
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	495.200.000	495.200.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	70.513.702.000	64.030.440.061	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.120.600.000	1.086.779.761	
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	400.000.000	366.179.761	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	400.000.000	400.000.000	
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	220.600.000	220.600.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	100.000.000	100.000.000	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	350.200.000	322.439.900	
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	350.200.000	322.439.900	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	8.248.000.000	11.996.816.000	
4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	2.650.000.000	1.607.309.000	
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	900.000.000	5.141.507.000	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	1.908.000.000	1.998.000.000	
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.250.000.000	3.250.000.000	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	29.306.400.000	26.275.385.000	
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.206.400.000	356.400.000	
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	200.000.000	200.000.000	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	27.900.000.000	25.718.985.000	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	31.488.502.000	24.349.019.400	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	30.742.102.000	23.605.305.000	
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	234.400.000	234.400.000	
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	282.000.000	282.000.000	
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	230.000.000	227.314.400	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	33.163.947.594	33.297.491.893	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	33.163.947.594	33.297.491.893	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	33.163.947.594	33.297.491.893	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.886.710.924	26.166.658.843	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	194.371.236	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	109.830.610	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	41.562.176	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	42.978.450	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.632.757.821	17.976.057.919	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.524.299.821	17.104.909.919	
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	858.458.000	695.114.000	
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.898.200	32.976.200	
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	74.686.200	62.058.200	
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.344.200	33.568.200	
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.406.200	15.276.200	
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.665.200	32.155.200	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	129.000.000	88.040.284	
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	37.072.899	
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	79.000.000	50.967.385	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	959.220.000	939.178.000	
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.388.000	30.346.000	
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	408.832.000	408.832.000	
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000	500.000.000	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.519.244.450	2.315.326.550	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	58.740.100	
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104.378.000	154.378.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.892.000	407.892.000	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.467.000	223.367.000	
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	325.000.000	349.120.000	
5.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	62.026.300	
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.761.000	100.761.000	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	657.746.450	959.042.150	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.881.789	553.974.689	
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	238.752.400	
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	125.000.000	75.572.000	
5.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	339.881.789	239.650.289	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.011.196.864	2.934.736.458	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.040.000	173.040.000	
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.000.000	242.000.000	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.581.156.864	2.504.696.458	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.410.000	1.164.973.707	
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.560.000	76.560.000	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	366.850.000	533.600.000	
5.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	24.813.707	
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.000.000	530.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	2.944.056.800	2.615.075.030	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.624.803.800	1.371.224.700	
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	301.223.400	7.715.800	
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	209.632.100	129.747.600	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	45.300.400	45.300.400	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	800.000.000	787.275.000	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	268.647.900	401.185.900	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	654.653.100	602.533.300	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	273.336.900	282.293.900	
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	158.317.200	148.836.900	
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	222.999.000	171.402.500	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	664.599.900	641.317.030	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	179.835.000	203.763.000	
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	222.575.900	212.535.900	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	98.476.030	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	187.189.000	126.542.100	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.333.179.870	4.515.758.020	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.609.231.700	1.610.622.100	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147.966.100	122.323.600	
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	228.353.000	90.359.000	
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	429.995.000	377.618.300	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	146.783.500	124.173.000	
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	176.745.300	89.343.800	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	120.342.500	98.339.000	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	223.476.300	708.465.400	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.450.940.450	875.157.500	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	169.506.480	140.546.500	
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	93.732.980	64.091.500	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	159.564.520	89.516.900	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	433.008.720	299.879.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	217.195.450	116.504.300	
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	92.632.300	67.096.900	
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	120.000.000	87.575.600	
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	165.300.000	9.946.600	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.273.007.720	2.029.978.420	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	641.000.000	444.664.000	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	439.500.000	408.903.700	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	549.707.720	616.407.720	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	642.800.000	560.003.000	
5.02	KEUANGAN	798.212.484.276	860.009.644.142	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	685.329.743.395	742.805.869.570	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	682.998.935.499	739.774.778.274	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.978.395.967	44.332.025.012	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	616.484.400	616.484.400	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	293.309.000	293.309.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	166.459.900	166.459.900	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.813.000	72.813.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.902.500	83.902.500	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.130.490.765	27.348.537.534	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.651.454.859	19.419.795.034	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.211.717.406	7.661.424.000	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000	75.000.000	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	192.318.500	192.318.500	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	388.164.000	550.500.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	388.164.000	550.500.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.027.315.152	5.612.720.807	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.223.000	42.783.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.880.980	197.699.100	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.696.000	124.333.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.320.000	25.320.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	164.843.000	164.843.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.863.208.900	4.490.188.675	
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	624.143.272	537.554.032	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.079.168.134	1.526.967.826	
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	325.070.750	346.275.150	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	557.960.584	747.563.662	
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	200.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196.136.800	233.129.014	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.799.591.296	7.539.515.776	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.274.096	228.074.096	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.999.200	217.273.680	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.305.318.000	7.094.168.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.182.220	1.137.298.669	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	623.952.000	774.084.150	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.100.000	126.100.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.130.220	237.114.519	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	616.834.493.388	692.235.404.658	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.606.466.466	4.836.466.466	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	475.000.000	475.000.000	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	425.000.000	425.000.000	
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	345.679.950	520.679.950	
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	250.000.000	450.000.000	
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	475.000.000	475.000.000	
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	425.000.000	425.000.000	
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	350.000.000	630.000.000	
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	452.429.996	677.429.996	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.1.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	0	150.000.000	
5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	408.356.520	608.356.520	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	667.858.792	667.858.792	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	223.246.000	223.246.000	
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	246.126.000	246.126.000	
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	198.486.792	198.486.792	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.400.037.796	1.460.037.796	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	214.064.096	274.064.096	
5.02.02.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	95.086.000	95.086.000	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	193.632.000	193.632.000	
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	244.560.000	244.560.000	
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	459.319.700	459.319.700	
5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	193.376.000	193.376.000	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.828.221.167	2.878.221.167	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	279.748.392	279.748.392	
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	0	200.000.000	
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	640.039.000	640.039.000	
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	442.680.000	442.680.000	
5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	150.000.000	
5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	350.000.000	
5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	147.067.500	147.067.500	
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	318.686.275	668.686.275	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	608.468.896.713	562.008.766.955	
5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	7.000.000.000	4.130.000.000	
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	25.200.000.000	10.200.000.000	
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30.000.000.000	13.000.000.000	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	546.268.896.713	534.678.766.955	
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	863.012.454	863.012.454	
5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	500.000.000	500.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	363.012.454	363.012.454	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.186.046.144	3.207.348.604	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.186.046.144	3.207.348.604	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	388.568.500	508.568.500	
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	150.930.250	150.930.250	
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	400.000.000	419.838.000	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	621.100.744	1.172.403.204	
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	370.581.300	342.933.300	
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	350.000.000	
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	254.865.350	262.675.350	
5.02.0.00.0.00.02.0001	UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET	1.867.359.800	2.267.643.200	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.867.359.800	2.267.643.200	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.673.000	681.739.000	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	70.000.000	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.319.000	4.256.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.512.000	93.908.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	60.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	19.900.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.942.000	433.675.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.170.991.800	1.006.209.200	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.065.600	274.994.144	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	830.926.200	731.215.056	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.695.000	579.695.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.695.000	3.695.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	300.000.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.000.000	102.000.000	
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.000.000	174.000.000	
5.02.0.00.0.00.02.0002	UPT DANA BERGULIR	463.448.096	763.448.096	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	203.190.696	280.577.896	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.716.600	209.103.800	
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.995.800	7.769.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.788.800	40.788.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.600.000	4.600.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.332.000	155.946.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.474.096	71.474.096	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.474.096	71.474.096	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	260.257.400	482.870.200	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	260.257.400	482.870.200	
5.02.02.1.05.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	260.257.400	482.870.200	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	112.882.740.881	117.203.774.572	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	102.040.289.519	106.209.292.820	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.943.068.820	98.309.114.521	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	PROVINSI			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263.191.780	287.746.669	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.430.780	87.544.669	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.589.000	45.689.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.172.000	154.513.000	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.935.110.886	71.167.261.358	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.695.110.792	35.123.825.001	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.197.555.094	36.003.246.357	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.445.000	40.190.000	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.959.400	49.959.400	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.959.400	49.959.400	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	617.737.600	368.104.600	
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	382.689.600	233.002.600	
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	235.048.000	135.102.000	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	437.864.000	356.178.100	
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000	49.750.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	174.503.000	175.692.000	
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	221.361.000	130.736.100	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.180.799.536	6.983.805.809	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	30.697.400	45.801.700	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kantor			
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.522.494.330	3.469.453.280	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	101.475.000	112.358.184	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.488.510	399.096.585	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.173.687.296	1.517.010.060	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.984.000	33.984.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	202.580.000	195.970.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	852.393.000	1.210.132.000	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	751.162.400	823.417.050	
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	45.890.000	
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	701.162.400	777.527.050	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.975.725.000	11.495.344.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000	10.500.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.701.925.000	2.659.544.000	
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	90.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.173.300.000	8.735.300.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.731.518.218	6.777.297.535	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.096.783.000	1.004.451.574	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	419.720.000	453.870.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.215.015.218	5.318.975.961	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	850.918.400	766.201.800	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	313.333.500	354.113.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	313.333.500	354.113.400	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	346.191.600	281.932.600	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	346.191.600	281.932.600	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	191.393.300	130.155.800	
5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	191.393.300	130.155.800	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.246.302.299	7.133.976.499	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.246.302.299	7.133.976.499	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.280.194.300	1.141.747.900	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	811.834.000	763.151.000	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.445.081.100	1.445.081.100	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.004.185.130	1.061.483.130	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	763.791.269	665.110.669	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	287.495.000	266.852.500	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	1.051.092.000	997.272.000	
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	101.691.000	101.691.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	207.174.000	457.930.000	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	293.764.500	233.657.200	
5.02.0.00.0.00.03.0001	UPT PPD BATAM CENTRE	3.032.891.350	2.927.529.500	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	911.779.100	809.467.200	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.894.300	575.703.800	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10.029.000	8.078.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kantor			
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000	54.000.000	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	38.895.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.233.500	186.145.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	278.081.800	269.895.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	1.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.550.000	11.690.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.512.000	57.776.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.512.000	55.776.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.372.800	175.987.400	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.174.800	152.451.400	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.198.000	23.536.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.121.112.250	2.118.062.300	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.121.112.250	2.118.062.300	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.304.148.250	1.319.128.300	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	487.750.000	474.550.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	329.214.000	324.384.000	
5.02.0.00.0.00.03.0002	UPT PPD Tanjungpinang	1.696.224.472	1.648.272.872	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	798.481.672	791.270.072	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.123.200	185.941.600	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	7.000.000	4.341.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kantor			
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.652.000	31.652.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.635.200	54.635.200	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.436.000	21.436.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	3.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	4.500.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.400.000	66.377.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.425.472	236.395.472	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000	1.750.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.675.472	234.645.472	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.933.000	368.933.000	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.090.000	225.090.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.843.000	11.843.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.000.000	132.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	897.742.800	857.002.800	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	897.742.800	857.002.800	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	159.180.000	155.060.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	533.800.300	510.250.300	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	204.762.500	191.692.500	
5.02.0.00.0.00.03.0003	UPT PPD BINTAN	999.734.596	949.446.496	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	605.874.596	610.938.896	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.441.846	144.061.146	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.102.200	2.721.500	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.212.546	10.212.546	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.212.600	41.212.600	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.135.000	6.135.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.368.000	4.368.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.822.000	7.822.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.589.500	71.589.500	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.872.750	132.417.750	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.872.750	130.417.750	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.560.000	334.460.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.330.000	124.280.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.930.000	31.880.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.300.000	178.300.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	393.860.000	338.507.600	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	393.860.000	338.507.600	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	142.900.000	128.732.900	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	101.700.000	91.372.400	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	149.260.000	118.402.300	
5.02.0.00.0.00.03.0004	UPT PPD KARIMUN	1.225.163.294	1.175.014.029	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	883.846.294	793.041.629	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.298.900	245.493.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.907.400	9.907.400	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.855.500	57.855.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.037.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.918.000	7.918.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.075.000	3.075.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.543.000	121.700.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.736.250	318.277.085	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.260.000	2.260.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.476.250	316.017.085	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.811.144	229.271.144	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.220.000	74.220.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.600.000	26.060.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.991.144	128.991.144	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	341.317.000	381.972.400	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	341.317.000	381.972.400	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	97.603.000	117.465.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	96.907.900	126.337.900	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	146.806.100	138.169.500	
5.02.0.00.0.00.03.0005	UPT PPD LINGGA	936.275.410	881.713.715	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	534.412.410	627.948.715	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.228.410	367.150.800	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.895.500	6.895.500	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.091.210	5.121.500	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.559.300	46.560.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.098.400	110.869.800	
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	2.900.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.584.000	194.804.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.172.000	86.172.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	1.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.172.000	85.172.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.012.000	174.625.915	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.200.000	51.200.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.812.000	32.204.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.000.000	91.221.915	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	401.863.000	253.765.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	401.863.000	253.765.000	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	111.300.000	26.681.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	115.550.000	54.464.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	175.013.000	172.620.000	
5.02.0.00.0.00.03.0006	UPT PPD NATUNA	994.726.100	1.007.557.500	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	558.114.600	639.245.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.934.600	343.995.000	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.584.900	3.196.300	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.234.800	13.524.800	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.876.900	22.876.900	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.175.000	67.375.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.063.000	237.022.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.560.000	81.560.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.560.000	79.560.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.620.000	213.690.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.340.000	72.340.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.080.000	14.350.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.200.000	127.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	436.611.500	368.312.500	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	436.611.500	368.312.500	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	139.033.000	131.236.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	120.036.600	103.536.600	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	177.541.900	133.539.900	
5.02.0.00.0.00.03.0007	UPT PPD ANAMBAS	386.526.000	477.758.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	280.426.000	381.958.000	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.170.000	196.232.000	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.795.400	8.659.400	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.398.400	10.398.400	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.650.200	21.650.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.803.000	20.808.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.840.000	3.840.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.483.000	129.676.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.536.000	77.036.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.036.000	75.536.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.720.000	108.690.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.280.000	10.710.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000	3.980.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.320.000	94.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	106.100.000	95.800.000	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	106.100.000	95.800.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	36.200.000	40.300.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	69.900.000	55.500.000	
5.02.0.00.0.00.03.0008	UPT PPD BATU AJI	682.427.600	1.066.515.100	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	511.970.900	855.208.400	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.050.900	517.288.400	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.438.000	3.438.000	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.132.000	56.843.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.630.900	100.931.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.508.000	268.626.400	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.632.000	1.632.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.610.000	1.610.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.100.000	84.208.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.310.000	186.310.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000	1.750.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.560.000	184.560.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.610.000	151.610.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.630.000	47.630.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.980.000	4.980.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.000.000	99.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	170.456.700	211.306.700	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	170.456.700	211.306.700	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9.900.000	17.400.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	60.989.700	157.989.700	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	99.567.000	35.917.000	
5.02.0.00.0.00.03.0009	UPT PPD KIJANG	496.607.800	461.985.700	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	323.350.600	366.814.500	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.736.600	132.200.500	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.495.200	4.495.200	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.286.400	58.121.300	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.605.000	8.375.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.350.000	53.209.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.000.000	74.000.000	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	72.000.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.614.000	160.614.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.410.000	77.410.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.204.000	17.204.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.000.000	66.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	173.257.200	95.171.200	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	173.257.200	95.171.200	
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	32.336.000	31.875.000	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	57.991.800	40.141.800	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	82.929.400	23.154.400	
5.02.0.00.0.00.03.0010	UPT PPD TANJUNG BATU	391.874.740	398.688.840	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	302.548.340	324.287.940	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.244.340	177.077.540	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.600	2.955.800	
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.700	4.565.700	
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.909.840	25.566.640	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.396.200	22.947.400	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	2.250.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.454.000	1.704.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.233.000	117.088.000	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.186.000	34.315.400	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.583.400	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.686.000	32.732.000	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.118.000	112.895.000	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.990.000	38.990.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.128.000	5.005.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.000.000	68.900.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	89.326.400	74.400.900	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	89.326.400	74.400.900	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	39.591.400	27.395.900	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	49.735.000	47.005.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	20.933.856.727	17.294.666.280	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	20.933.856.727	17.294.666.280	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	20.933.856.727	17.294.666.280	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.733.883.027	15.043.240.970	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.530.800	151.152.800	
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	177.530.800	151.152.800	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.065.371.289	12.398.190.463	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.559.901.289	11.948.128.463	
5.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	505.470.000	450.062.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.196.400	35.000.000	
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.196.400	35.000.000	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.017.832.738	1.084.417.207	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.779.200	14.781.600	
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.164.400	300.127.869	
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.735.100	27.735.100	
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.497.038	88.212.638	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.835.000	24.835.000	
5.03.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	122.536.000	122.536.000	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	534.145.000	491.148.000	
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.041.000	15.041.000	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968.169.500	932.252.500	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.660.000	26.460.000	
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.780.000	33.780.000	
5.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000	48.000.000	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	860.729.500	824.012.500	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.782.300	442.228.000	
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	422.432.300	418.678.000	
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.350.000	23.550.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.199.973.700	2.251.425.310	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	490.478.300	351.709.260	
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	245.807.200	184.228.460	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	48.889.300	42.449.000	
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	50.000.000	50.000.000	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	97.803.500	46.803.500	
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	47.978.300	28.228.300	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	692.986.800	919.137.000	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	246.319.400	478.760.500	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	146.667.200	126.667.200	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	300.000.200	313.709.300	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	771.654.300	674.185.100	
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	471.879.200	399.705.000	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	199.992.100	199.992.100	
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	99.783.000	74.488.000	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	244.854.300	306.393.950	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	98.064.100	98.063.750	
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	98.167.000	133.807.000	
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	48.623.200	74.523.200	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.353.402.067	10.908.529.203	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.353.402.067	10.908.529.203	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.353.402.067	10.908.529.203	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.584.127.517	10.407.750.519	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.218.000	5.218.000	
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.218.000	5.218.000	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.724.864.517	8.845.913.827	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.724.864.517	8.680.985.827	
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	164.928.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.797.500	630.565.257	
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.110.000	5.110.000	
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.689.300	181.589.300	
5.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.297.000	3.297.000	
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.441.200	60.807.957	
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.270.000	52.670.000	
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.500.000	28.500.000	
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.490.000	298.591.000	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.379.000	252.484.935	
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.379.000	252.484.935	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.440.000	593.080.000	
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.440.000	593.080.000	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.428.500	80.488.500	
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.120.000	59.180.000	
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.308.500	21.308.500	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	769.274.550	500.778.684	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	164.043.000	164.043.000	
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	164.043.000	164.043.000	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	605.231.550	336.735.684	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	75.412.500	66.796.684	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	295.479.000	269.939.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.819.916.400	2.095.209.693	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.819.916.400	2.095.209.693	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.819.916.400	2.095.209.693	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	349.901.000	327.401.000	
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.901.000	327.401.000	
5.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	349.901.000	327.401.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.470.015.400	1.767.808.693	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.342.742.200	392.435.000	
5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	297.455.500	1.350.000	
5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	468.152.500	361.251.000	
5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	355.303.700	29.834.000	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.410.829.000	1.021.252.900	
5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	395.000.000	395.000.000	
5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	587.829.000	325.752.900	
5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	428.000.000	300.500.000	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	491.444.200	354.120.793	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	233.050.200	140.430.449	
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	137.650.700	137.650.700	
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	120.743.300	76.039.644	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	4.461.502.361	7.167.535.320	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.461.502.361	7.167.535.320	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.461.502.361	7.167.535.320	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.608.471.561	6.590.279.031	
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.330.852.361	5.183.467.344	
5.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.330.852.361	4.948.876.844	
5.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	234.590.500	
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.530.800	625.818.897	
5.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.047.000	24.027.500	
5.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.215.070	47.549.100	
5.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.090.000	49.917.200	
5.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.040.000	19.500.000	
5.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.400.000	24.007.567	
5.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	366.738.730	460.817.530	
5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	471.990.440	512.342.790	
5.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	74.289.000	67.986.200	
5.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	397.701.440	444.356.590	
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.097.960	220.650.000	
5.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.007.960	36.000.000	
5.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.090.000	180.650.000	
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.000.000	48.000.000	
5.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.000.000	48.000.000	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	853.030.800	577.256.289	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	240.492.500	194.516.489	
5.06.02.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	70.492.800	60.786.789	
5.06.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	169.999.700	133.729.700	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	416.938.600	210.310.600	
5.06.02.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	344.938.600	138.310.600	
5.06.02.1.02.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	24.000.000	24.000.000	
5.06.02.1.02.03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	24.000.000	24.000.000	
5.06.02.1.02.04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	24.000.000	24.000.000	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	195.599.700	172.429.200	
5.06.02.1.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	149.999.700	112.500.200	
5.06.02.1.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	24.000.000	22.028.500	
5.06.02.1.03.03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000	37.900.500	
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	2.339.599.420	4.607.234.031	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	2.339.599.420	4.607.234.031	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	2.339.599.420	4.607.234.031	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.482.743.469	2.710.728.544	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.700.800	17.325.900	
5.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.700.800	17.325.900	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.133.123.556	2.462.513.431	
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.133.123.556	2.319.593.431	
5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	142.920.000	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.671.113	130.425.213	
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.671.113	130.425.213	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.248.000	100.464.000	
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.000.000	74.000.000	
5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.248.000	26.464.000	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	856.855.951	1.896.505.487	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	856.855.951	1.896.505.487	
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	271.704.700	1.024.199.067	
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	161.464.000	262.545.471	
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	423.687.251	609.760.949	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	35.395.223.928	35.570.262.514	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	35.395.223.928	35.570.262.514	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	35.395.223.928	35.570.262.514	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.995.348.636	27.860.658.356	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	PROVINSI			
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.149.700	160.795.700	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.348.200	67.297.200	
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.801.500	93.498.500	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.699.726.796	20.388.457.216	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.283.026.796	19.954.357.216	
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	416.700.000	434.100.000	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	930.384.500	984.939.500	
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	122.652.500	122.652.500	
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	807.732.000	862.287.000	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.235.081.140	4.518.285.940	
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.986.000	100.986.000	
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.494.192.020	1.230.278.720	
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.800.000	60.800.000	
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	658.944.980	635.657.480	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	484.553.000	186.793.600	
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.007.900	14.007.900	
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.421.597.240	2.289.762.240	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.494.100	724.494.100	
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.494.100	724.494.100	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.188.512.400	1.083.685.900	
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	887.573.800	706.912.100	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.834.600	100.834.600	
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.104.000	275.939.200	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.068.861.096	5.908.281.244	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.879.239.148	3.555.056.048	
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	870.372.048	764.474.948	
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	889.634.000	706.685.000	
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	37.546.200	16.874.200	
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	127.159.000	127.135.000	
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	235.080.600	235.050.600	
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	1.250.000.000	1.250.000.000	
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	469.447.300	454.836.300	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.189.621.948	2.353.225.196	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	75.254.000	51.339.000	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.114.367.948	2.301.886.196	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.331.014.196	1.801.322.914	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.087.788.248	985.951.216	
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	314.986.048	359.986.016	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	772.802.200	625.965.200	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.243.225.948	815.371.698	
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	705.281.848	424.895.048	
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	82.270.500	67.257.500	
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	245.358.000	134.201.050	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	210.315.600	189.018.100	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.294.626.300	34.732.725.092	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.294.626.300	34.732.725.092	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.294.626.300	34.732.725.092	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.146.594.980	9.943.847.776	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.360.700	201.111.409	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.539.900	160.290.609	
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.820.800	40.820.800	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.050.605.019	6.873.933.270	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.407.705.019	6.391.927.270	
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	642.900.000	482.006.000	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.037.447.037	986.983.481	
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.710.900	73.038.134	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.664.137	53.372.908	
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.370.000	20.370.000	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	887.702.000	840.202.439	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.064.600	111.818.000	
8.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.064.600	111.818.000	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.649.077.624	1.589.463.616	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.446.000	53.261.660	
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.850.000	74.850.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.509.781.624	1.461.351.956	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.040.000	180.538.000	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.040.000	180.538.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	537.919.800	468.348.000	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	537.919.800	468.348.000	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	338.099.500	329.319.000	
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	139.029.000	139.029.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.918.357.240	2.918.771.240	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.918.357.240	2.918.771.240	
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	123.159.000	123.159.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	70.000.000	70.000.000	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.725.198.240	2.725.612.240	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.280.267.000	5.413.063.996	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.280.267.000	5.413.063.996	
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	145.845.700	129.832.257	
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	134.221.300	121.031.739	
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.000.200.000	5.162.200.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	558.181.200	308.985.100	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	558.181.200	308.985.100	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	108.436.500	93.987.400	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.934.000	90.934.000	
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	141.257.200	124.063.700	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	15.853.306.080	15.679.708.980	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	15.853.306.080	15.679.708.980	
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	109.529.000	94.893.900	
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	96.881.000	96.881.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13.755.632.880	13.761.522.880	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	212.086.000	155.516.000	
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.679.177.200	1.570.895.200	

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 tercantum pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	1.117.494.319.870	1.032.808.283.669
2	Belanja Barang dan Jasa	1.387.535.678.679	1.379.719.542.215
3	Belanja Bunga	5.200.000.000	2.500.000.112
4	Belanja Hibah	215.926.272.179	271.480.479.823
5	Belanja Bantuan Sosial	2.750.579.658	2.469.415.863
6	BELANJA MODAL	539.947.333.410	581.482.725.471
	Belanja Modal Tanah	8.981.000.000	9.063.084.747
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.092.458.195	169.522.516.137
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.696.836.116	191.453.386.714
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.247.280.681	207.539.729.455
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.929.758.418	3.304.008.418
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	600.000.000
7	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	13.000.000.000
8	Belanja Bagi Hasil	546.268.896.713	534.678.766.955
9	Belanja Bantuan Keuangan	25.200.000.000	10.200.000.000
	TOTAL	3.870.323.080.509	3.828.339.214.108

BAB V
PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Plafon Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Perubahan Rincian Plafon Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.000.000.000	350.514.470.171	(39.485.529.829)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	210.000.000.000	170.514.470.171	(39.485.529.829)
6.1.04	Penerima Pinjaman Daerah	180.000.000.000	180.000.000.000	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.000.000.000	350.514.470.171	(39.485.529.829)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	390.000.000.000	350.514.470.171	(39.485.529.829)

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada RKPD Tahun 2022 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 berisikan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program pembangunan daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disepakati antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran definitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS, yang secara substansi disampaikan dalam Pengantar Nota Keuangan Gubernur.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : B/903/2021/BKAD-SET/2022
02/160/MOU-DPRD/IX/2022
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Ansar Ahmad, S.E, M.M
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak – Kota Tanjungpinang

Bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2. a. Nama : Jumaga Nadeak, SH
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- b. Nama : Rizki Faisal, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- c. Nama : Raden Hari Tjahyono
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
- d. Nama : dr. T. Afrizal Dachlan
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Tanjungpinang, 15 September 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M

Selaku,
PIHAK KEDUA



JUMAGA NADEAK, SH
KETUA

RIZKI FAISAL, SE, MM
WAKIL KETUA

RADEN HARI TJAHYONO
WAKIL KETUA

dr. T. AFRIZAL DACHLAN
WAKIL KETUA